



# PEMERINTAH KOTA BEKASI



## PERUBAHAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2018-2023

JL. JEND. A. YANI NO. 1 BEKASI  
TELP; FAX. (021) 88959980

WEBSITE : [DISKOMINFO.BEKASIKOTA.GO.ID](http://DISKOMINFO.BEKASIKOTA.GO.ID)



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN**  
**PERSANDIAN**

Jalan Jend. A. Yani No. 1 Telepon (021) 88961767 Fax 8895 9980  
B E K A S I

---

***Kata Pengantar***

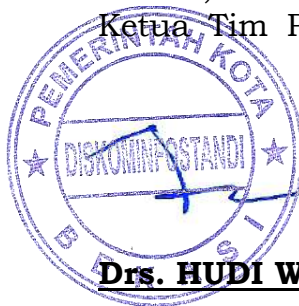
Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya kepada kita semua. Dan tak lupa mengucapkan Alhamdulillah, kami Tim Penyusun Rencana Strategis Perubahan yang selanjutnya disingkat Renstra Perubahan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi yang dibentuk dengan keputusan Walikota telah menyelesaikan pekerjaan dalam rangka penyusunan Renstra Perubahan tahun 2018-2023.

Renstra Perubahan sebagai penjabaran dari RPJMD Perubahan Kota Bekasi tahun 2018-2023 yang diimplementasinya oleh Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi, dalam kurun waktu 5 tahun, Sesuai Visi Kota Bekasi, yaitu : **“Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”** .

Demikian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika telah tersusun. Dan tak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renstra Perubahan ini.

Bekasi, 2 Oktober 2020

Ketua Tim Penyusun Renstra



**Drs. HUDI WIJAYANTO, M. Si**

## DAFTAR ISI

<b><i>Kata Pengantar</i></b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Landasan Hukum</b> .....	<b>6</b>
<b>1.3 Maksud dan Tujuan</b> .....	<b>9</b>
<b>1.4 Sistematika Penulisan</b> .....	<b>9</b>
<b>GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN</b> .....	<b>11</b>
<b>2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian</b> .....	<b>11</b>
<b>2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian</b> .....	<b>15</b>
<b>2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian</b> .....	<b>22</b>
<b>2.11 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika statistik dan Persandian</b> .....	<b>30</b>
<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI</b> 36	
<b>3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian</b> .....	<b>36</b>
<b>3.2 Telaahan terkait Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bekasi</b> .....	<b>39</b>
<b>3.3 Telaah Rencana Strategis Kementerian Kominfo dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat</b> .....	<b>41</b>
<b>3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)</b> .....	<b>45</b>
<b>3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis</b> .....	<b>46</b>
<b>TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI</b> .....	<b>48</b>
<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>57</b>

<b>BAB VI 58</b>	
<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>58</b>
<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>86</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>87</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana strategik untuk periode 5 tahun yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagai tolak ukur Pengendalian dan evaluasi capaian Perangkat Daerah dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah dan sebagai bahan perumusan rancangan renja PD yang berpedomanan kepada RPJMD. Renstra ini disusun untuk menggambarkan wujud pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi selama 5 tahun periode.

Penyelenggaraan pemerintahan telah berubah ke arah desentralisasi yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional, seiring dengan digulirkannya semangat reformasi melalui perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari “*rule government*” menjadi “*good governance*”, dari sentralistis (terpusat) ke desentralistis (otonomi daerah). Perubahan tersebut memberikan ruang yang lebih besar bagi setiap daerah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di alam demokrasi. Salah satu ciri dari demokrasi adalah keterbukaan informasi publik. Eskalasi kebutuhan informasi bagi publik makin terasa dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang demikian pesatnya. Dalam tatanan kemasyarakatan telah terbentuk sebuah dunia tanpa batas (*borderless world*) yaitu pola komunikasi masyarakat dengan akses komunikasi dan informasi yang luas dan terbuka. Keterbukaan ini tentunya harus disikapi secara baik oleh Pemerintah dengan mengubah pola komunikasi konvensional yang cenderung satu arah menjadi pola komunikasi aktif adaptif secara dua arah dengan masyarakatnya.

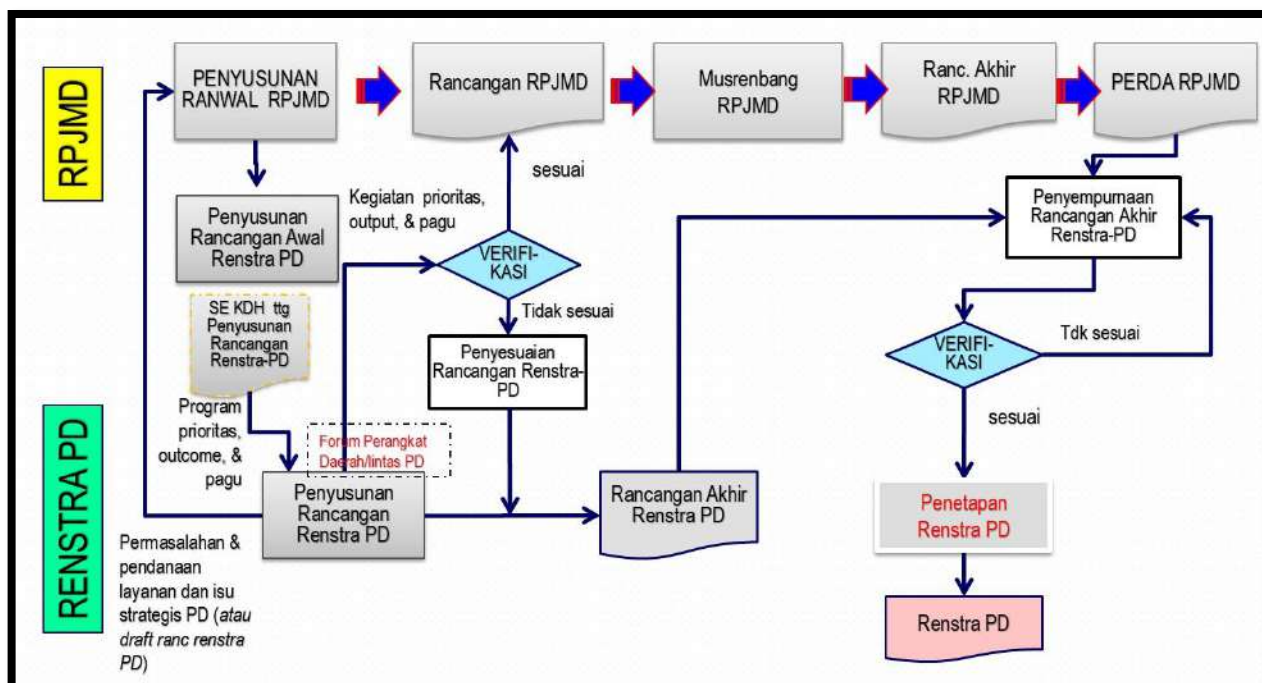
Hal inilah kemudian yang mendorong terjadinya restrukturisasi organisasi yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi eksistensinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berupaya untuk memberikan layanan-layanan informasi berupa layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi serta layanan informasi dan komunikasi publik bagi masyarakat Kota Bekasi. Sehingga pada proses penyusunan Rencana Strategis ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi.

Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga, penyusunan Renstra Diskominfostandi telah dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta

tahapan penyusunan Renstra di Kota Bekasi mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

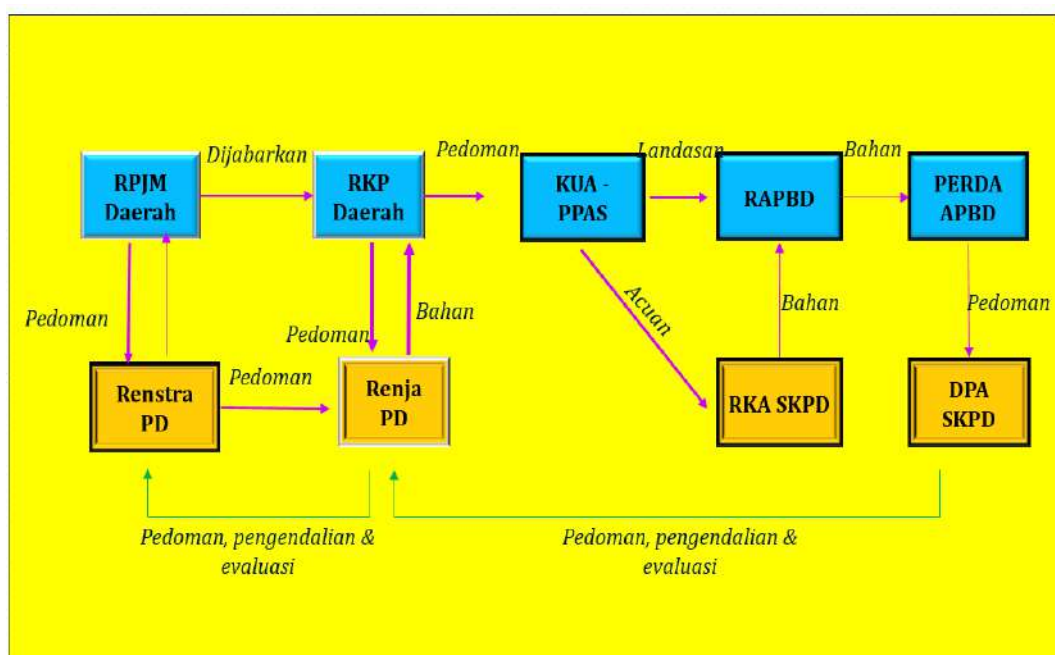


Gambar 1. 1: Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD  
 Sumber : Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017)

Untuk dapat mewujudkan Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan seperti yang di cita-citakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi tahun 2018-2023 perlu adanya dukungan pembangunan yang handal. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian.

Dari uraian tugas pokok tersebut, berarti bahwa Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian bertanggung jawab terhadap urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian untuk masyarakat di Kota Bekasi. Sebagai upaya untuk mengimplementasikan hal-hal diatas, maka perlu menyusun Rencana Strategi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi yang dikenal dengan Rencana Strategis SKPD periode 2018-2023. Semoga

dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 ini, diharapkan dapat memberikan layanan-layanan informasi berupa layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi serta layanan informasi dan komunikasi publik bagi masyarakat Kota Bekasi. Berikut kedudukan Renstra Dalam Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disajikan dalam gambar di bawah ini:



**Gambar 1. 2: Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Sumber : Power Point Kemendagri Tahun 2017 (Versi Permendagri No 86 Tahun 2017)

Dalam Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat dengan memperhatikan RPJM Nasional dan Renstra Kementerian Kominfo. Program-program yang dipakai pada Renstra Diskominfostandi Kota Bekasi disesuaikan dengan Program-program yang dilaksanakan pada Kementerian Kominfo dan Renstra Provinsi Jawa Barat.

Renstra Strategis ini juga tidak terlepas dari keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RTRW Kota Bekasi



dan KLHS sebagai bagian dari pemanfaatan struktur dan pola ruang Kota Bekasi yang diarahkan oleh dokumen RTRW dan KLHS Kota Bekasi dalam perencanaan kegiatan yang masuk dalam tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian Kota Bekasi.

Memasuki tahun 2020 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Kota Bekasi mengalami bencana non-alam wabah Corona Virus Disease (COVID-19), sehingga mengganggu bahkan berpotensi menggagalkan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Bencana wabah pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap kesehatan dan perekonomian karena menurunkan berbagai aktivitas. Selain

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi melakukan evaluasi dan kaji ulang dalam menetapkan berbagai asumsi dalam menyusun dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang lebih responsif dan menekankan pada proses pengambilan keputusan sistematis yang berfokus pada isu-isu terkini.

Di samping itu, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang baru tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi dan kajian serta terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tersebut dipandang perlu melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 termasuk DiskominfoStandi dengan mengacu pada perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Renstra Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data

Indonesia;

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informasi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;

21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi;
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sebagaimana telah telah beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Kota Bekasi;
25. Peraturan Wali Kota Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Statistik dan Persandian Kota Bekasi;
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai sebuah dokumen rencana yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD setiap tahun selama 5 tahun, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

#### **b. Tujuan**

1. Mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan penelitian pengembangan daerah dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi daerah;
3. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Diskominfostandi Kota Bekasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
5. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan;

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Diskominfostandi
- 2.2 Sumber daya Diskominfostandi
- 2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfostandi
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS  
KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfostandi

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian**

##### **a. Tugas**

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi memiliki tugas yaitu menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian.

##### **b. Fungsi**

Selanjutnya dalam rangka menjalankan tugas tersebut maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang komunikasi, informatika, statistik dan Persandian;
- b) Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dibidang komunikasi, informatika, statistik dan Persandian, serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan OPD, lembaga atau instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas.

##### **c) Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2016 dan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta rincian Tugas Jabatan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi terdiri atas :

##### **a) Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang pengelolaan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, e-government serta statistik dan Persandian untuk mencapai visi dan misi Dinas

b) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik. membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.

c) Bidang Pengelolaan Informasi Publik,

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengelolaan informasi publik, strategi komunikasi publik serta layanan komunikasi dan informasi publik untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya, membawahkan:

1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
2. Seksi Strategi Komunikasi Publik;
3. Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik.

d) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ,

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi infrastruktur jaringan TIK dan telekomunikasi, infrastruktur layanan data



centre serta keamanan informasi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya, membawahkan:

1. Seksi Infrastruktur Jaringan TIK dan Telekomunikasi;
2. Seksi Infrastruktur Layanan Data Centre;
3. Seksi Keamanan Informasi.

e) Bidang e-Government,

Bidang e-Government mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengembangan aplikasi dan integrasi sistem informasi, pengembangan e-government serta tata kelola e-government untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya, membawahkan:

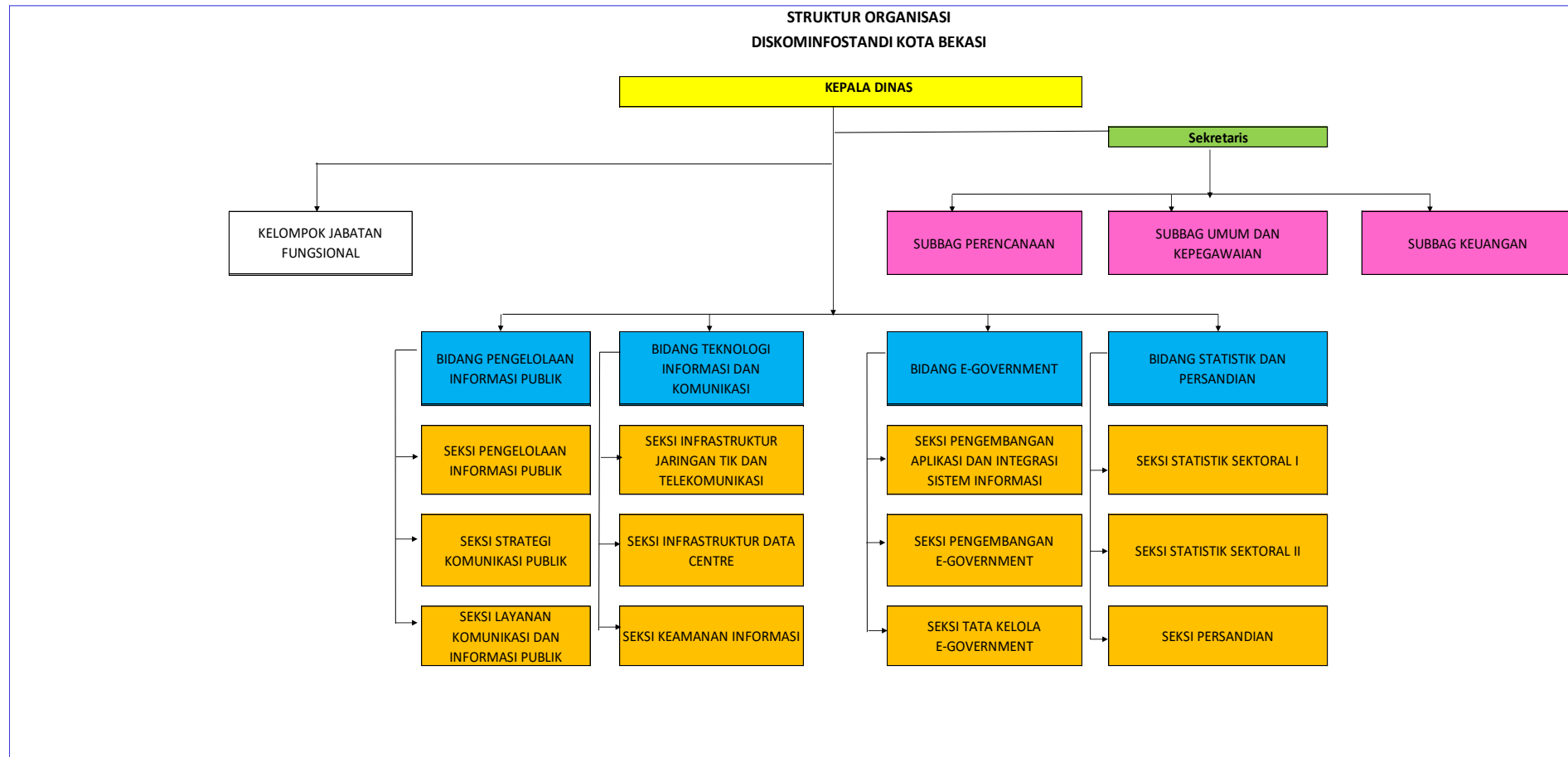
1. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi;
2. Seksi Pengembangan e-Government;
3. Seksi Tata Kelola e-Government.

f) Bidang Statistik dan Persandian,

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi statistik sektoral, statistik Sektoral I serta Persandian untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya, membawahkan :

1. Seksi Statistik Sektoral I;
2. Seksi Statistik Sektoral II;
3. Seksi Persandian.

**Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi, sebagai Berikut :**



**Gambar 2. 1: Stuktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi**

## 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Sumber Daya yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, meliputi :

### I. Aparatur

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki pegawai sebanyak 98 orang Pegawai yang terdiri dari pegawai yang berstatus PNS berjumlah 51 pegawai dan 47 pegawai berstatus TKK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel daftar pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dibawah ini :

**Tabel 2. 1: Daftar Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2020**

NO	UNIT KERJA	PNS	TKK	CPNS	JUMLAH
1	Sekretariat	14	9		
2	Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik	9	15		
3	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	9	8		
4	Bidang E-Goverment	9	9		
5	Bidang Statistik dan Persandian	10	6		
<b>JUMLAH</b>		<b>51</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>98</b>

*Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember Tahun 2020*

Untuk daftar sesuai dengan tingkat golongan pegawai yang berada di lingkungan Diskominfo standi selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 2: Daftar Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Berdasarkan Golongan / Pangkat Tahun 2020**

NO	UNIT KERJA	GOL. I	GOL. II	GOL. III	GOL. IV	JUMLAH
1	Sekretariat		3	6	6	15
2	Bidang Pengelolaan Informasi Publik		-	5	3	8

3	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		2	6	1	9
4	Bidang E-Government		-	7	2	9
5	Bidang Statistik dan Persandian		1	8	1	10
6	CPNS					
<b>JUMLAH</b>						51

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember Tahun 2020

**Tabel 2. 3: Jumlah Pejabat Eselon pada Diskominfo Standi Tahun 2020**

NO	ESSELONERING	JUMLAH
1	Eselon II b	1
2	Eselon III a	1
3	Eselon III b	4
4	Eselon IV a	15
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember Tahun 2020

**Tabel 2. 4: Daftar Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2020**

NO	Pendidikan Terakhir	PNS	TKK	CPNS
1	Doktor			
2	Magister Manajemen	3		
3	Magister Sistem dan Teknik Transportasi	1		
4	Magister Sumber Daya Manusia	1		
5	Magister Ilmu Administrasi / M. Si	13		
6	Magister Teknik			
7	Magister Administrasi Publik	1		
8	Sarjana Hukum		1	
9	Sarjana Sistem Informasi	3	5	
10	Sarjana Administrasi Negara	2	2	
11	Sarjana Ekonomi Manajemen			
12	Sarjana Ekonomi	3	2	
13	Sarjana Ilmu Politik		1	
14	Sarjana Teknik Informatika	9	6	
15	Sarjana Manajemen		1	
16	Sarjanan Ilmu Pemerintahan			
17	Sarjana Teknik Elektro	2		
18	Sarjana Akuntansi		1	
19	Sarjana Psikologi		1	
20	Sarjana Ilmu Komunikasi		2	

21	Sarjana Komputer		2	
22	Sarjana Sosial	2		
23	Sarjana Matematika		1	
24	Sarjana Pendidikan		3	
25	D4 Sistem Informasi		1	
26	D3 ( Akuntansi)	1		
27	D3 (Teknik Komputer)		1	
28	D3 (Manajemen Informatika)	2	2	
29	D3 (Teknik Elektro)		1	
30	SMK		8	
31	SMA	6	6	
32	Paket C	2		
	Jumlah	51	47	0

*Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember Tahun 2020*

**Tabel 2. 5: REKAPITULASI JUMLAH PNS DILINGKUNGAN DISKOMINFOSTANDI KOTA BEKASI  
BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN GOLONGAN**

NO	UNIT ORGANISASI	DATA KEPEGAWAIAN																												
		MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN											MENURUT GOLONGAN																	
		SD	SLTP	SMU	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	JML	I				II				III				IV				JML	
													a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		e
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	Kepala Dinas								✓																		✓			
2	Sekretaris Dinas								✓															✓						
3	Subag Umum dan Kepegawaian								✓															✓						
4	Subag Keuangan								✓															✓						
5	Subag Perencanaan								✓															□	✓					
6	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik							✓															✓							
7	Seksi Pengelolaan Informasi Publik							✓																✓						
8	Seksi Strategi Komunikasi Publik								✓															✓						
9	Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik							✓															✓							
10	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi								✓															✓						
11	Seksi Infrastruktur Jaringan TIK dan Telekomunikasi								✓														✓							

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember Tahun 2020

NO	UNIT ORGANISASI	DATA KEPEGAWAIAN																																	
		MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN											MENURUT GOLONGAN																						
		SD	SLTP	SMU	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	JML	I				II				III				IV					JML					
													a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
12	Seksi Infrastruktur Pusat Data Centre									✓																									
13	Seksi Keamanan Informasi									✓																									
14	Kepala Bidang EGovernment									✓																	✓								
15	Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi									✓																	✓								
16	Seksi Pengembangan EGovernment									✓																	✓								
17	Seksi Tata Kelola EGovernment									✓																	✓								
18	Kepala Bidang Statistik dan Persandian										✓																✓								
19	Seksi Statistik Sektoral I									✓																	✓								
2	Seksi Statistik Sektoral II										✓																✓								
21	Seksi Persandian										✓																✓								
23	Kelompok Jabatan Fungsional								9	1											6	1	3												
24	Staff Pelaksana			8			3		6	3								1	2	3	2	6	3	2	1										
25	CPNS																																		
<b>JUMLAH</b>				<b>8</b>			<b>3</b>		<b>21</b>	<b>19</b>								<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>11</b>		<b>1</b>								

Dari tabel tersebut kita dapat melihat bahwa kualitas sumber daya manusia telah memenuhi syarat ataupun klasifikasi yang sudah ditentukan sebagai standarisasi tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Kota Bekasi.

Secara kuantitas aparatur DiskominfoStandi sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DiskominfoStandi, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang tambahan yang mempunyai keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan teknologi informasi (IT) dan tidak adanya fungsional perencanaan untuk menciptakan inovasi terbaru yang bermanfaat untuk masyarakat Kota Bekasi.

## II. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 2. 6: Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi**

<b>No.</b>	<b>Barang</b>	<b>Banyaknya</b>	<b>Keterangan (Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat/Belum ada)</b>
1	Personal Komputer	54 unit	3 unit rusak
2	Printer	28 unit	3 unit rusak
3	Laptop/Notebook	16 unit	3 unit rusak
4	Scanner	6 unit	2 unit rusak
5	Finger Print	2 unit	1 unit rusak
6	Mesin Facsimile	2 unit	Baik
7	Handphone	5 unit	Baik
8	Mesin Ketik Elektronik	2 unit	Baik
9	Alat Penghancur Kertas	2 unit	Baik
10	Hand Pallet Small 3T	1 unit	Baik
11	Krisbow Pallet Plastic 1.5T	1 unit	Baik
12	Lemari Besi	13 unit	Baik
13	Lemari Besi Kaca	3 unit	Baik
14	Filing kabinet	15 unit	2 unit rusak
15	Rak Besi Siku	4 unit	Baik
16	Lemari loker	2 unit	Baik
17	Pesawat Telephon	2 unit	Baik
18	Kulkas	1 unit	Baik



19	Dispenser	3 unit	Baik
20	Video Drone	1 unit	Baik
21	Proyektor/infocus	3 unit	Baik
22	AC Split	20 unit	2 rusak berat
23	AC Unit	3 unit	1 unit rusak
24	Meja Kerja Pimpinan/Kadis	1 unit	Baik
25	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5 unit	Baik
26	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	16 unit	Baik
27	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	71 unit	Baik
28	Meja Rapat	2 unit	Baik
29	Meja Pantry	1 unit	Baik
30	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2 unit	Baik
31	Kursi Kerja Pimpinan/Kadis	1 unit	Baik
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 unit	Baik
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16 unit	Baik
34	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	62 unit	4 rusak
35	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	10 unit	Baik
36	Kursi Hadap Sekdis	2 unit	Baik
37	Kursi Rapat	15 unit	Baik
38	Kursi Lipat	20 unit	Baik
39	Kursi Biasa (Kursi Makan/Serbaguna)	10 unit	Baik
40	Sofa	5 unit	Baik
41	Unitemuptible Power Supply (UPS)	20 unit	4 unit rusak
42	TV Display	4 unit	1 unit rusak
43	Jam Mekanis (jam Dinding)	2 unit	Baik
44	Sound System	2 unit	Baik
45	Genset	1 unit	Baik
46	Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat	8 unit	Baik
47	Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua	7 unit	Baik
48	Tanggal Alumunium	2 unit	Baik

### III. Sarana Informasi Dalam Pelayanan Publik

Dalam rangka kemudahan informasi dan komunikasi publik maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah membuka jalur komunikasi publik, sebagai berikut :

**Tabel 2. 7: Daftar Sarana Informasi Dalam Pelayanan Publik**

1.	Fitur Tanya Jawab pada kota bekasi - SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> - Call Center 1500 444 dan 119
----	--

	- LPID : ppid.bekasikota.go.id
2.	Manajemen email : kominfo@bekasikota.go.id
3.	Website : diskominfo.bekasikota.go.id
4.	Twitter : @KominfoBekasi
5.	Instagram : diskominfobekasi
6.	sandi.standi@bekasikota.go.id

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk menganalisis kinerja pelayanan Diskominfostandi Tahun 2019 dan Tahun 2020 digunakan indikator sasaran (indikator Kinerja Utama) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) .

Pada Tahun 2019 dan 2020 Diskominfostandi Kota Bekasi memiliki satu sasaran yang harus diwujudkan yaitu: Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (Digital Government Pemerintah Kota Bekasi), dengan 4 indikator kinerja sasaran yang menjadi IKU. Berikut capaian kinerja keempat sasaran yang menjadi IKU tersebut sebagai berikut:

**Tabel 2.8 Capaian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2019**

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2019			2020				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan	1	<i>Indeks Layanan Pemerintah/ Publik</i>	Indeks (nilai)	1,81	3,05	169%	2,70	3,31	123%

<b>Informasi secara Elektronik (Digital Government Pemerintah Kota Bekasi)</b>		<b>Berbasis Digital</b>							
	2	<b>Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	Indeks (nilai)	2,00	1,83	91,5%	2,30	2,30	100%
	3	<b>Indeks Ketersediaan Data dan Informasi</b>	Indeks (nilai)	0,21	0,21	100%	1,38	1,38	100%
	4	<b>Indeks Keamanan Informasi</b>	Indeks (nilai)	2,35	2,35	100%	2,95	2,80	95%

Secara umum pada tahun 2019 telah disampaikan sebelumnya bahwa dari 4 (empat) indikator sasaran DiskominfoStandi terdapat 3 indikator sasaran yang mencapai target yang ditetapkan dan 1 (satu) indikator sasaran yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik diperoleh sebesar 91,5% tidak dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target adalah kurangnya sarana prasarana untuk publikasi pada platform media yang telah direncanakan dan Kurangnya SDM yang berkompetensi

Untuk meningkatkan capaian “Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik” dilakukan alternatif solusi sebagai berikut:

1. Perlu adanya sarana dan prasarana untuk publikasi kegiatan Pemerintah Kota Bekasi pada platform media yang ditargetkan;
2. Dibutuhkan tenaga ahli yang berkompetensi.

Selanjutnya untuk capaian tahun 2020, capaian kinerja Indeks Keamanan Informasi diperoleh sebesar 95% tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target adalah faktor non-alam wabah pandemi covid-19.

untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama indeks keamanan informasi adalah:

1. Melakukan maintenance dalam pengelolaan website OPD yang ada di pemerintahan Kota Bekasi agar dapat terkelola keamanannya
2. Mengimplementasikan standar dan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang berlaku
3. Melakukan fasilitasi Penerbitan Sertifikat Elektronik ke Perangkat Daerah
4. Pendampingan Assesment Aplikasi yg akan terintegrasi dengan sertifikat Elektronik
5. Meningkatkan penggunaan Jaring Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah .

Pencapaian pelayanan DiskominfoStandi selain mengacu kepada RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 juga mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sebagai Bahan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Bekasi yang dapat dilihat pada tabel 2.9 sebagai berikut:

**Tabel 2. 9: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Bekasi**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Indeks Layanan Publik Berbasis Digital			IKU	1,81	2,70	-	-	-	3,05	3,31	-	-	-	169%	123%	-	-	-
2.	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik			IKU	2,00	2,30	-	-	-	1,83	2,30	-	-	-	91,5%	100%	-	-	-
3.	Indeks Ketersediaan Data			IKU	0,21	1,38	-	-	-	0,21	1,38	-	-	-	100%	100%	-	-	-
4.	Indeks Keamanan Informasi			IKU	2,35	2,95	-	-	-	2,35	2,80	-	-	-	100%	95%	-	-	-
5.	Indeks Layanan Publik Berbasis IT			IKU	-	-	3,99	4,35	4,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfo			IKU	-	-	84,80	86,77	88,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			IKU	-	-	81,17	82,79	84,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		100%		100% (47 OPD)	100% (44 OPD)	-	-	-	100 % (47 OPD)	97,2% (43 /440 PD)	-	-	-	100%	97,2%	-	-	-

9.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		100%		100% (9 Layanan)	100% (136 layanan)	-	-	-	55,56% (5 layanan)	92,6% (136 layanan)	-	-	-	55,56%	92,6%	-	-	-
10.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah		100%		100% (2.448.830 Jumlah penduduk 2019)	100% (3.083.664)	-	-	-	4,01% (98.215 jumlah penduduk 2019)	72,21% (2.226.582/3.083.644)	-	-	-	4,01%	72,21%	-	-	-
11.	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo		100%		100% (51 ASN)	100% (51 ASN)	-	-	-	100% (10 ASN)	35,29% (18/51)	-	-	-	100%	35,29%	-	-	-
12.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100%		100% (47 OPD)	100% (44 PD)	-	-	-	53,19% (25 OPD)	100% (44/44) PD	-	-	-	53,19	100%	-	-	-
13.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		100%		100% (47 OPD)	100% (44) PD	-	-	-	53,19% (25 OPD)	100% (44/44) PD	-	-	-	53,19	100%	-	-	-
14.	Tingkat Keamanan informasi pemerintah daerah		100%		100% (2 area)	100% (5 area)	-	-	-	100% (2 area)	57% (285/5area)	-	-	-	100%	57%	-	-	-

Adapun untuk pendanaan anggaran dan realisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian pertahun. Dalam Tabel 2.9 tersaji anggaran dan realisasi selama 2 tahun sebagai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian. Yakni antara tahun 2019 sampai tahun 2020 dapat dilihat dalam Tabel 2.9

**Tabel 2. 10: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Bekasi**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Uraian		
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 6.446.445.000	Rp 6.686.025.000				Rp 5.291.617.994	Rp 6.478.157.980				82%	97%						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 300.000.000	Rp 64.675.000				Rp 17.626.100	Rp 44.196.880				6%	68%						
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 20.000.000	Rp -				Rp -	Rp -				0%	0%						
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 30.000.000	Rp -				Rp -	-				0%	0%						
6	Program Pengelolaan E-Government	Rp 2.885.882.000	Rp 3.927.794.000				Rp 1.591.376.530	Rp 3.655.011.378				55,14%	93%						
7	Program Pengelolaan Komunikasi Publik	Rp 145.500.000	Rp 62.500.000				Rp 29.100.000	Rp 62.500.000				20%	100%						

Sumber: LRA 2019 dan LKIP Tahun 2020 dan Simpelbang



8	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000			Rp 51.500.000	Rp 243.677.500				20,60%	97%				
	Tunda Bayar	Rp 3.867.722.550	Rp -			Rp 3.867.722.550										
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	Rp 13.945.549.550	Rp 10.990.994.000			Rp 10.848.943.174	Rp 10.483.543.738				78%	95,38%				

Berdasarkan tabel 2.9 Untuk Total Pagu Anggaran Tahun 2019 BLPU dan BLU sebesar Rp 13.945.549.550 dengan realisasi Rp 10.848.943.174 Ratio 78%. Pada tahun 2020 Total Pagu Anggaran BLPU dan BLU sebesar Rp 10.990.994.000 dengan realisasi Rp 10.483.543.738 Ratio 95% hal ini menunjukkan bahwa capaian Diskominfo standi mempunyai capaian dengan baik.

## 2.11 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika statistik dan Persandian

### 1. Analisis SWOT

Tabel 2. 8: Analisis SWOT

Faktor Internal				Faktor Eksternal			
No	Kekuatan / Strength (S)	No	Kelemahan / Weakness (W)	No	Peluang / Opportunity (O)	No	Ancaman / Threat (T)
1	Struktur Organisasi cukup handal dalam merespon kebutuhan manajerial	1	Keterbatasan jumlah SDM dan skill yang sesuai dengan kebutuhan	1	Era teknologi informasi telekomunikasi sudah menjadi indikator akuntabilitas pemerintah daerah	1	Informasi dan Komunikasi Publik sudah merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah sehingga berpotensi meningkatnya komplain masyarakat
2	Dukungan dan komitmen Kepala Daerah dalam mewujudkan E-Government	2	Belum ada perencanaan pendanaan dari pemerintah (SKPD baru)	2	Semangat daerah dan masyarakat dalam mewujudkan jati diri Smart City	2	Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat dan memerlukan pemilihan perangkat dan penggunaan secara cerdas dan cepat
3	Team work yang kuat	3	Sistem kerja belum terintegrasi	3	Arus informasi dan aspirasi yang diberi akses luas akan menguatkan partisipasi masyarakat	3	Keterbukaan informasi publik belum diimbangi dengan budaya masyarakat yang bijak dalam menggunakan perangkat elektronik cerdas
4	Sudah ada kebijakan pemerintah daerah yang mengatur pengembangan TIK	4	Infrastuktur IT yang tersedia masih terbatas	4	Tersedianya aplikasi dari pemerintah pusat dan sharing aplikasi antar daerah	4	Masyarakat Kota Bekasi sebagai penyangga Ibukota merupakan masyarakat heterogen yang dapat berpotensi konflik sosial
5	Kemampuan pembiayaan	5	belum tersedianya sumber data dan pelaporan yang kuat	5	Terbukanya peluang dalam berkolaborasi dengan pebisnis (G To B)	5	Laju Pertumbuhan Penduduk menyebabkan populasi tidak terkendali yang jika tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja baru akan memicu timbulnya permasalahan peningkatan jumlah pengangguran

6	Penggunaan aplikasi <i>electronic government (egov)</i> telah membudaya dalam Pemerintahan	6	Kebutuhan penyesuaian program dan kegiatan dengan segera dalam upaya mencapai sasaran dan target akhir pada RPJMD yang masih rendah	6	Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi	6	Kondisi geografis, penurunan luas lahan terbuka hijau dan pembangunan kota begitu pesat dapat menimbulkan permasalahan persampahan, banjir, kemacetan
---	--	---	---	---	--	---	---

**MATRIKS EXTERNAL FACTORS EVALUATION (EFE)**

**Tabel 2. 9: Tabel EFE**

No	Critical Success Factor	Skala (1-4)	Weight (1,0)	Adjusted Score
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3x4</b>
	<b>PELUANG</b>			
1	Era teknologi informasi telekomunikasi sudah menjadi indikator akuntabilitas pemerintah daerah	4	0,12	0,480
2	Semangat daerah dan masyarakat dalam mewujudkan jati diri Smart City	4	0,11	0,440
3	Arus informasi dan aspirasi yang diberi akses luas akan menguatkan partisipasi masyarakat	2	0,09	0,180
4	Tersedianya aplikasi dari pemerintah pusat dan sharing aplikasi antar daerah	3	0,08	0,240
5	Terbukanya peluang dalam berkolaborasi dengan pebisnis (G To B)	2	0,08	0,160
6	Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi	4	0,09	0,360
	<b>NILAI</b>		<b>0,57</b>	<b>1,860</b>

**MATRIKS INTERNAL FACTORS EVALUATION (IFE)**

**Tabel 2. 10: Tabel IFE**

No	Critical Success Factor	Skala (1-4)	Weight (1,0)	Adjusted Score
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3x4</b>
	<b>KEKUATAN</b>			
1	Struktur Organisasi cukup handal dalam merespon kebutuhan manajerial	3	0,07	0,210
2	Dukungan dan komitmen Kepala Daerah dalam mewujudkan E-Government	4	0,07	0,280
3	Team work yang kuat	2	0,07	0,140
4	Sudah ada kebijakan pemerintah daerah yang mengatur pengembangan TIK	4	0,08	0,320
5	Kemampuan pembiayaan	3	0,07	0,210
6	Penggunaan aplikasi <i>electronic government (egov)</i> telah membudaya dalam Pemerintahan	4	0,08	0,320
	<b>NILAI</b>		<b>0,44</b>	<b>1,480</b>

**MATRIKS EXTERNAL FACTORS EVALUATION (EFE)**

No	Critical Success Factor	Skala (1-4)	Weight (1,0)	Adjusted Score
1	2	3	4	3x4
<b>ANCAMAN</b>				
1	Informasi dan Komunikasi Publik sudah merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah sehingga berpotensi meningkatnya komplain masyarakat	2	0,08	0,160
2	Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat dan memerlukan pemilihan perangkat dan penggunaan secara cerdas dan cepat	2	0,07	0,140
3	Keterbukaan informasi publik belum diimbangi dengan budaya masyarakat yang bijak dalam menggunakan perangkat elektronik cerdas	3	0,07	0,210
4	Masyarakat Kota Bekasi sebagai penyangga Ibukota merupakan masyarakat heterogen yang dapat berpotensi konflik sosial	2	0,07	0,140
5	Laju Pertumbuhan Penduduk menyebabkan populasi tidak terkendali yang jika tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja baru akan memicu timbulnya permasalahan peningkatan jumlah pengangguran	2	0,07	0,140

**MATRIKS INTERNAL FACTORS EVALUATION (IFE)**

No	Critical Success Factor	Skala (1-4)	Weight (1,0)	Adjusted Score
1	2	3	4	3x4
<b>KELEMAHAN</b>				
1	Keterbatasan jumlah SDM dan skill yang sesuai dengan kebutuhan	2	0,08	0,160
2	Belum ada perencanaan pendanaan dari pemerintah (SKPD baru)	2	0,10	0,200
3	Sistem kerja belum terintegrasi	1	0,10	0,100
4	Infrastuktur IT yang tersedia masih terbatas	2	0,10	0,200
5	belum tersedianya sumber data dan pelaporan yang kuat	3	0,10	0,300

6	Kondisi geografis, penurunan luas lahan terbuka hijau dan pembangunan kota begitu pesat dapat menimbulkan permasalahan persampahan, banjir, kemacetan	4	0,07	0,280
<b>NILAI</b>			<b>0,43</b>	<b>1,070</b>
<b>TOTAL NILAI</b>			1,00	<b>2,930</b>

#### **PELUANG**

Skala 4= Merupakan PELUANG berskala baik/besar

Skala 3= Merupakan PELUANG berskala sedang

Skala 2= Merupakan PELUANG berskala kecil

Skala 1= Merupakan PELUANG berskala sangat kecil/tidak ada

#### **TANTANGAN**

Skala 4= Merupakan TANTANGAN berskala sangat kecil/tidak ada

Skala 3= Merupakan TANTANGAN berskala kecil

Skala 2= Merupakan TANTANGAN berskala sedang

Skala 1= Merupakan TANTANGAN berskala besar

6	Kebutuhan penyesuaian program dan kegiatan dengan segera dalam upaya mencapai sasaran dan target akhir pada RPJMD yang masih rendah	2	0,08	0,160
<b>NILAI</b>			<b>0,56</b>	<b>1,120</b>
<b>TOTAL NILAI</b>			1,00	<b>2,600</b>

#### **Kekuatan**

Skala 4= Merupakan kekuatan berskala baik/besar

Skala 3= Merupakan kekuatan berskala sedang

Skala 2= Merupakan kekuatan berskala kecil

Skala 1= Merupakan kekuatan berskala sangat kecil/tidak ada

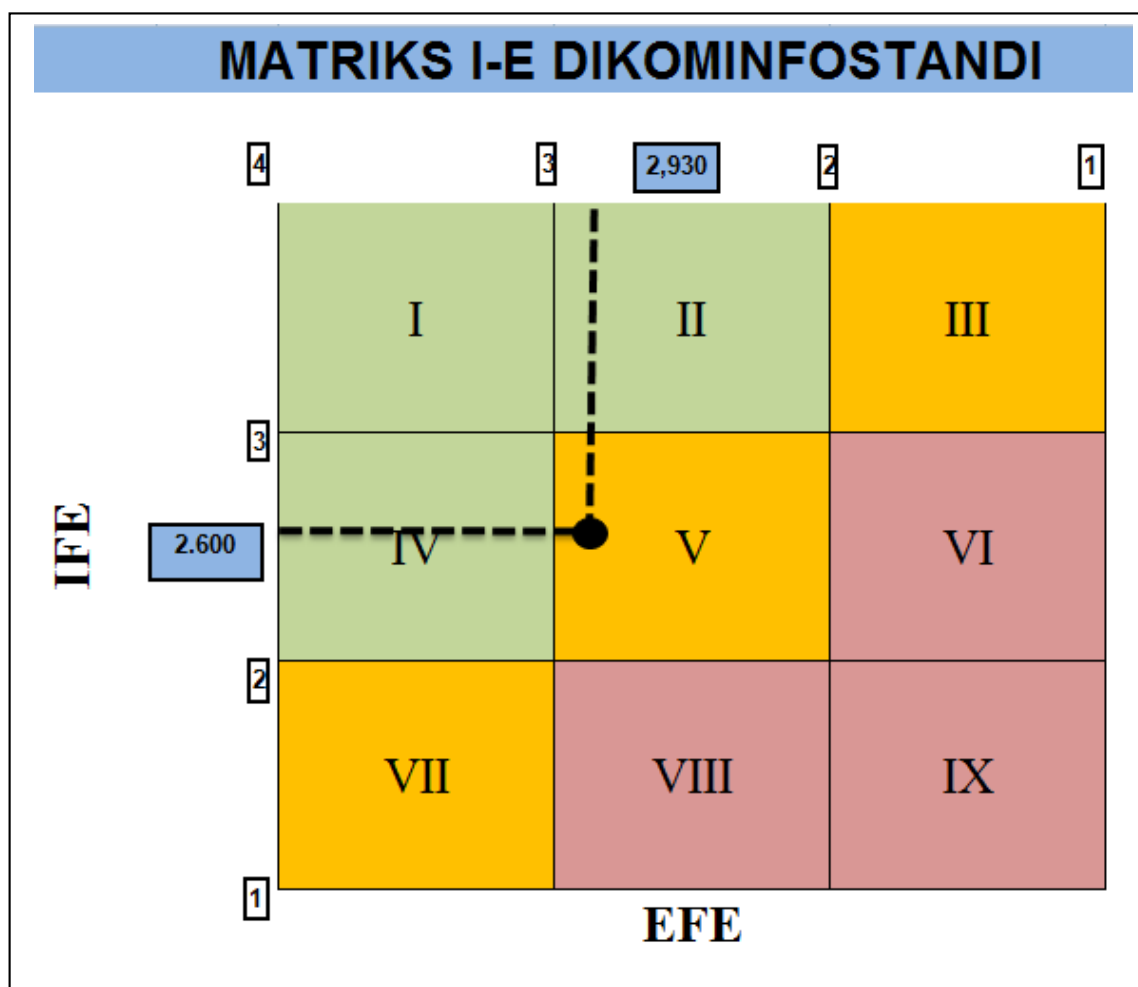
#### **Kelemahan**

Skala 4= Merupakan kelemahan berskala sangat kecil/tidak ada

Skala 3= Merupakan kelemahan berskala kecil

Skala 2= Merupakan kelemahan berskala sedang

Skala 1= Merupakan kelemahan berskala besar



Gambar 2. 2: Gambar Matriks IFE dan EFE Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi

Berdasarkan tabel di atas maka posisi Diskominfo Standi berada dalam kuadran V yang artinya dalam posisi *Grow and Build*. Hal ini bermakna bahwa sebagai sebuah Dinas yang baru terbentuk Diskominfo Standi perlu melakukan penguatan internal sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam Pengembangan e-Government dan infrastruktur jaringan, pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik, serta Pengembangan Statistik dan Persandian di Kota Bekasi, dengan menerapkan berbagai strategi, sebagai berikut :

**Tabel 2. 12: Tabel Urutan Startaegis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi**

No	Urutan Strategi	Nilai
1	Implementasi kebijakan pengembangan TIK	6,58
2	Pembentukan Tim dan penerapan Smart City	6,42
8	Pembangunan infrastruktur IT dengan melibatkan pemerintah pusat, provinsi dan swasta	6,30
6	Penyusunan Decision Support System dan Analytical System	6,21
16	Forum komunikasi publik antara Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah terkait dengan masyarakat	6,19

	untuk penjangkauan aspirasi dan pemecahan masalah secara interaktif	
21	Penguatan peran tim PPID Utama, PPID Pembantu, Media Massa dan Kelompok Informasi masyarakat dalam rangka membentuk opini yang positif terhadap masyarakat	6,16
11	Penyusunan Bekasi Open Government Data	6,04
18	Pembangunan Sistem Informasi Analitik yang terhubung dengan smart device berteknologi IoT dan M2M di lokasi-lokasi rawan permasalahan perkotaan	6,03
<b>No</b>	<b>Urutan Strategi</b>	<b>Nilai</b>
4	Kerjasama dengan pebisnis dalam pengembangan IT Kota Bekasi	5,92
13	Penyediaan informasi yang tepat dan cepat kepada masyarakat melalui Konsep Smart City/Patriot Operation Centre	5,67
14	Menyusun konsep pengembangan data dan informasi yang akan disampaikan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan	5,31
10	Pengadaan dan penyiapan SDM yang sesuai dengan kebutuhan	5,24
20	Penerapan sistem monitoring dan konsistensi terhadap hasil evaluasi sesuai aturan yang telah ditetapkan	5,20
19	Penyusunan pedoman pembangunan TIK di Kota Bekasi	5,09
3	Membangun kerjasama dengan pemerintah pusat terkait aplikasi	5,03
5	Pelibatan masyarakat (komunitas TIK, akademisi) dalam penyediaan dan akses informasi	4,91
9	Penguatan sistem pelaporan menggunakan aplikasi yang terintegrasi	4,82
17	Penjajagan dengan pelaku usaha, komunitas TIK dan KIM, serta mitra strategis dalam penciptaan lapangan kerja baru	4,78
12	Kerjasama antar Lembaga dalam pengembangan e Gov dan Smart City	4,74
7	Penyusunan perencanaan pendanaan pengembangan IT	4,69
15	Sosialisasi penggunaan internet sehat pada siswa SD dan SMP	4,68
22	Pencarian alternatif pembiayaan pengembangan TIK melalui CSR, dan alternatif penguatan infrastruktur melalui sharing infrastructure dan kontribusi	4,53
23	Transfer knowlegde/pelatihan menjadi kewajiban vendor penyedia dan diatur dalam klausul perjanjian	4,46

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI,  
 INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI**

**3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi  
 Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan  
 Persandian**

**Tabel 3. 1: Tabel Identifikasi Masalah**

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyediaan sistem informasi teknologi pendukung pengembangan ekonomi kreatif	Belum optimalnya penyediaan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika	Ketersediaan akses jaringan internet berkecepatan tinggi
		Belum optimalnya sistem pendataan industri kreatif berbasis TIK	Peningkatan jaminan keamanan informasi
		Belum optimalnya sistem pemasaran industri kreatif berbasis TIK	Sistem pendataan digital untuk pengembangan industri kreatif
			Sistem pemasaran digital untuk pengembangan industri kreatif
		Belum optimal pembangunan infrastruktur jaringan TIK di Kota Bekasi	Ketersedian jaringan fiber optik untuk mendukung kelancaran akses data dan informasi di Kota Bekasi (Existing Infrastuktur FO



			terbangun ± 20 Km)
		Belum optimalnya penyediaan akses internet wifi gratis di ruang publik	Kemudahan masyarakat Kota Bekasi dalam mengakses layanan dan informasi mengenai pemerintah Kota Bekasi melalui terkoneksi jaringan internet wifi gratis di kantor pemerintahan, ruang public dan fasilitas public di Kota Bekasi (existing ± 1000 titik wifi gratis)
		Belum terpusatnya hosting/colocation sistem informasi layanan digital PD pada Data Center Pemerintah Kota Bekasi	Masih rendahnya kesadaran (awareness) untuk menjaga asset data dan sistem informasi layanan digital PD untuk menghosting layanan aplikasi pada Data Center Pemerintah Kota Bekasi (Existing layanan Data Centre Kota Bekasi telah

			tersertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi)
2	Layanan Informasi Digital	Belum Optimalnya Media informasi Digital (POC) bagi pengambilan kebijakan	SIM OPD masih belum terintegrasi
3	Layanan Publik Berbasis IT	Belum optimalnya Layanan public berbasis IT	Masih terdapat Layanan public yang belum menerapkan IT dan dilaksanakan secara online
2	Belum Optimalnya pendukung Penyelenggaraan Persandian di Kota Bekasi	Belum konsistennya pendukung jarring Komunikasi yang ada	Ketersediaan akses jaring pendukung yang belum konsisten
		Belum optimalnya kesadaran tentang Persandian	Terbatasnya pendukung tugas penyelenggaraan Persandian
3.	Belum Optimalnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral Secara Periodik	Belum optimalnya ketersediaan data di OPD	Data belum akurat dan terintegrasi
		Belum optimalnya proses pengumpulan data	Inkonsistensi data (Jangka Waktu proses pengabilan data)

Permasalahan Pokok pada tugas dan Fungsi Pelayanan DiskominfoStandi adalah belum optimalnya Sistem Informasi teknologi Pendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif yang disebabkan karena belum optimalnya penyediaan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika karena akses jaringan internet berkecepatan tinggi berupa jaringan Fiber Optik masih sangat minim dengan radius 21 km yang hanya melayani di lingkup kawasan di Pusat Kota Bekasi.

### 3.2 Telaahan terkait Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bekasi

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi terhadap Pencapaian Visi Misi dan Progran Kepala Daerah Terpilih

**Tabel 3. 2: Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi**

<b>VISI : Kota Bekasi Cerdas Kreatif Maju Sejahtera dan ihsan</b>				
<b>NO</b>	<b>Misi dan Program</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
	<b>Misi 1: Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>			
1	Informasi Dan Komunikasi Publik	Masih rendahnya kemampuan komunikasi dan informatika aparatur	Penggunaan jalur infrastruktur komunikasi yang belum optimal di setiapOPD dan masih terbatasnya bagi Publik	Program walikota terpilih Pengembangan layanan publik berbasis IT
		Belum optimalnya implementasi kebijakan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika	Rendahya motivasi aparatur, dan masyarakat dalam penguasaan komunikasi dan informatika	Program walikota terpilih Pengembangan sistem layanan cepat tanggap penanganan Sampah, jalan, saluran, PJU, dan kemacetan berbasis IT;

		Masih rendahnya dukungan keberlanjutan program dan anggaran		
2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Data statistik sektoral yang tersedia belum optimal	Masih rendahnya dukungan data dari opd	Program walikota terpilih pengembangan layanan publik berbasis it
3	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Belum optimalnya ketersediaan infratraktur jaringan komunikasi data	Penggunaan jalur infrastruktur komunikasi yang belum optimal di setiap OPD dan masih terbatasnya sarana akses TIK bagi Publik	Program walikota terpilih Pengembangan layanan publik berbasis IT
		Belum optimalnya implementasi kebijakan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika	Infrastruktur komunikasi	
			Yang belum optimal di setiap PD dan masih terbatasnya sarana akses TIK bagi Publik	
4	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informas	Belum optimalnya fungsi Persandian sebagai pengamanan informasi	Kurangnya pemahaman opd terhadap fungsi Persandian	Program walikota terpilih pengembangan layanan publik berbasis it
		Belum tersedianya jaring komunikasi SANDI yang optimal	Kurangnya SDM yang kompeten tentang ilmu Persandian	Program walikota terpilih Pengembangan layanan publik berbasis IT
		Kurangnya kesadaran keamanan informasi dilingkungan pemerintah kota bekasi	Kurangnya pengetahuan aparaturn tentang keamanan informasi	Program walikota terpilih pengembangan layanan publik berbasis IT

Keterkaitan DiskominfoStandi adalah dengan Misi (1) yaitu Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik, yang dituangkan pencapaian melalui program prioritas pembangunan Kepala daerah Terpilih, yaitu Program Pengembangan Layanan Publik Berbasis IT.

### 3.3 Telaah Rencana Strategis Kementerian Kominfo dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat

**Tabel 3. 3: : Rencana Strategis Kementerian Kominfo dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi**

	<b>Renstra K/L</b>	<b>Renstra Provinsi</b>	<b>Renstra Diskominfostandi</b>
<b>Tujuan</b>	1.Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia,	1.Terwujudnya Jawa Barat yang informatif dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik	1.Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi penyelenggaraan Layanan Publik
	2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digita,	2.Terwujudnya Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi	
	3.Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik		
<b>Sasaran</b>	1.Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	1.Terwujudnya Provinsi Jawa Barat yang informatif	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (Digital Government Pemerintah Kota Bekasi)
	2.Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	2..Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Diskominfostandi
	3.Meningkatnya konektivitas layanan pos	3.Terwujudnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	
	4.Terwujudnya Konektivitas Next Generation Nasional	4.Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	
	5.Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika		
	6.Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos,		

	telekomunikasi dan informatika		
	7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital		
	8. Dukungan Implementasi Digitalisasi Pemerintah		
	9. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		
	10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		
<b>Program</b>	1. Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	2. Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
	3. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
	4. Program Komunikasi Publik	4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
<b>Target Kinerja</b>	1. Jumlah desa mendapatkan layanan seluler 4G di wilayah 3T dan non 3T (kumulatif)	1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	1. Indeks Layanan Publik Berbasis IT
	2. Persentase (%) kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik broadband*28 (kumulatif)	2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfo standi
	3. Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses fixed broadband terhadap total Rumah Tangga* (kumulatif)	3. Persentase pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Daerah	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfo standi
	4. Kapasitas penyediaan satelit multifungsi (SATRIA1&2) (Gbps)*	4. Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	
	5. Persentase (%) rasio harga layanan jaringan mobil broadband terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB)*	5. Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	
	6. Persentase (%) rasio harga layanan fixed broadband terhadap pendapatan		

	perkapita (pada kecepatan upto 30 Mbps)*		
	7.Persentase (%) jangkauan populasi penyiaran TVdigital* (kumulatif)		
	8.Persentase (%) cakupan layanan pos (kumulatif)		
	9.Jumlah lokasi yang terkoneksi 5G pada tahap awal implementasi		
	10.Jumlah Penambahan spektrum frekuensi radio (kumulatif)		
	11.Jumlah penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio(unit)		
	12.Persentase (%) penyelesaian laboratorium balai besar pengujian perangkat telekomunikasi sebagai lab rujukan nasional*kumulatif)		
	13.Jumlah dokumen standar teknis sebagai pendukung sertifikasi perangkat pos dan informatika		
	14.Jumlah capaian PNBP bidang pos dan informatika		
	15.Indeks kepuasan publik terhadap layanan publik Kemenkominfo		
	16.Persentase (%) tingkat adopsi teknologi digital disektor strategis dan kawasan prioritas (kumulatif): a. Pertanian b.Pariwisata c. Logistik d.Maritim e.Pendidikan f.Kesehatan		
	17.Jumlah UMKM yang scale up dari usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah dengan adopsi teknologi digital* (kumulatif)		
	18.Jumlah penambahan unicorn (kumulatif)		

	19.Jumlah startup digital aktif yang terbentuk (kumulatif)		
	20.Persentase (%) Penyelenggara Sistem Elektronik yang patuh terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019		
	21.Persentase (%) Implementasi UU PDP (kumulatif)  Draft  RUU  PD		
	22.Persentase (%) ketersediaan riset dan penelitian bidang TIK		
	23.Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi bidang TIK (kumulatif)*		
	24.Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang digita		
	25.Jumlah penyediaan Pusat Data Nasional		
	26.Persentase (%) instansi yang memanfaatkan aplikasi generik yang dikembangkan secara multiplatform (kumulatif)		
	27.Jumlah Kab/Kota di kawasan prioritas (5 kawasan super prioritas dan 1 kawasan IKN) yang mengimplementasi Smart City (kumulatif)		
	28.Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (kumulatif)		
	29.Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN skala 1-5)		
	30.Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkominfo		
	31.Nilai opini laporan keuangan Kemenkominfo menurut kriteria		
	32.Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kemenkominfo		



	33.Indeks kompetensi pegawai Kemenkominfo		
<b>Lokasi</b>	Indonesia	Jawa Barat	Kota Bekasi

Dalam penyusunan Renstra Diskominfo menjadi sebuah kesatuan perencanaan yang utuh dengan tetap merujuk pada Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebagai wujud sinergitas pembangunan.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

**Tabel 3. 4: Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah**

<b>NO</b>	<b>Rencana Struktur Ruang</b>	<b>Struktur Ruang saat ini</b>	<b>Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan</b>	<b>Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Diskominfo</b>	<b>Arah Lokasi Pengembangan Pelayanan Diskominfo</b>
1	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi meliputi sistem kabel dan pengembangan sistem nirkabel;	pengembangan sistem jaringan telekomunikasi meliputi sistem kabel dan pengembangan sistem nirkabel;	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Sesuai	1000 titik wifi  Tahun 2020: 12 Kecamatan 170 titik wifi  Tahun 2021: 12 Kecamatan 170 titik wifi  Tahun 2022: Tahun 2022: 12 Kecamatan 170 titik wifi  Tahun 2022: Tahun 2022: 12 Kecamatan 172 titik wifi
2	Pengembangan sistem jaringan teknologi informasi yang terjangkau dan merata di seluruh wilayah kota;	pengembangan sistem jaringan teknologi informasi yang terjangkau dan merata di seluruh wilayah kota;	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Sesuai	Website SKPD dan Aplikasi Informasi Publik

3	Peningkatan kualitas infrastruktur jaringan <i>fiber optic</i> ;	peningkatan kualitas infrastruktur jaringan <i>fiber optic</i> ;	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Sesuai	Lingkungan walikota Bekasi dan SKPD (Diluar lingkungan walikota Bekasi),
4	Perluasan jaringan FO di arahkan di 12 kecamatan dan 56 kelurahan;	perluasan jaringan FO di arahkan di 12 kecamatan dan 56 kelurahan;	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Sesuai	Kelurahan, kecamatan, SMP, SMA, Ruang Publik
5	Pembangunan dan peningkatan kapasitas data center;	pembangunan dan peningkatan kapasitas data center;	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Sesuai	NOC Kota Bekasi

**Tabel 3. 5: Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah**

NO	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Diskominfostandi	Arah Lokasi Pengembangan Pelayanan Diskominfostandi
1	Kawasan pemukiman	Kawasan pemukiman	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor Program Informasi dan Komunikasi Publik	Program prioritas pengembangan informasi Fasos/Fasum	Kecamatan Mustika Jaya
2	Kawasan ekonomi kreatif	Kawasan permukiman	Program Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Informasi dan Komunikasi Publik	Program prioritas pengembangan industry kreatif berbasis TIK	Kecamatan Bekasi Timur dan Bekasi Selatan

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi, telaahan Renstra Kementerian Kominfo dan Diskominfo Provinsi Jawa Barat, telaahan RT/RW dan KLHS maka isu-isu strategis Diskominfostandi Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan melalui Pemanfaatan TIK;
2. Sinkronisasi pengembangan dan pemanfaatan E-Government untuk perluasan aksesibilitas informasi dan layanan publik;
3. Peningkatan kualitas isi informasi;
4. Diseminasi dan distribusi informasi;
5. Partisipasi Kelompok Informasi Masyarakat

6. Integritas dan peningkatan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi
7. Keterbukaan Pemerintah Kota Bekasi melalui ketersediaan informasi dan data di kota bekasi;
8. Persandian Menjamin Keamanan E-Government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan mendukung keamanan pembentukan ekosistem Kota Pintar ( Smart City); Metode yang digunakan dalam Penentuan isu strategis Diskominfostandi Kota bekasi melalui pelaksanaan FGD dengan seluruh bidang di Diskominfostandi Kota Bekasi dengan menyesuaikan/sinkronisasi program-program Walikota terpilih serta menyesuaikan dengan isu strategis dalam Dokumen RPJMD Kota terutama dalam Pemanfaatan TIK;
9. Pandemi Covid-19.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI**

#### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasara penyusunan kerangka kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang diperlukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pada tanggal 16 maret 2021 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Kota Bekasi oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi. Penyesuaian tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Nomor : 005/772/DiskominfoStandi. Set Tanggal 24 maret 2021 tentang reuiu renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023, perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Perubahan Tujuan, Sasaran, Program Diskominfostandi sesuai dengan Perubahan RPJMD Kota Bekasi

Tahun 2018-2023

RPJMD Tahun 2018-2023			Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Renstra Diskominfostandi Kota Bekasi 2018-2023			Reviu Renstra Diskominfostandi Kota Bekasi 2018-2023			Catatan Reviu
Tujuan	Sasaran	Program	Tujuan	Sasaran	Program	Tujuan	Sasaran	Program	Tujuan	Sasaran	Program	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas dan Profesionalisme pengelolaan dan Layanan Pemerintah	1. Program Pengelolaan E-Government 2. Program Pengelolaan Komunikasi Publik 3. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral 4. Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas dan Profesionalisme pengelolaan dan Layanan Pemerintah	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan publik	Meningkatnya penyelenggaraan layanan publik komunikasi dan informasi secara elektronik (digital government kota bekasi)	1. Program Pengelolaan E-Government 2. Program Pengelolaan Komunikasi Publik 3. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral 4. Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan publik	1. Meningkatnya penyelenggaraan layanan publik komunikasi dan informasi secara elektronik (digital government kota bekasi) 2. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Diskominfostandi	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 5. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Berdasarkan konsultasi dengan IPW dan Tapem diarahkan tujuan diskominfostandi " Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel dengan sasaran "Meningkatnya akuntabilitas dan Profesionalisme pengelolaan dan Layanan Pemerintah" dengan Nama program sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi dalam penyusunan perencanaan pembangunan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yaitu Misi yang pertama “Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” dengan Tujuan “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel”, dan Sasaran dari Tujuan Misi I tersebut yaitu “Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah”.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kota Bekasi tersebut, serta menangani permasalahan dan isu strategis perencanaan pembangunan, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi merumuskan 1 (satu) Tujuan sebagai berikut.

1. Tujuan 1 : Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi penyelenggaraan Layanan Publik

Indikator tujuan 1 : Indeks Layanan Publik Berbasis IT

Diskominfostandi merumuskan Tujuan 1 “Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi penyelenggaraan Layanan Publik ” dengan indikator “Indeks Layanan Publik Berbasis IT” yang diukur dari keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan penganggaran dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka mencapai Tujuan 1 tersebut, dirumuskan Sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mendukung Tujuan 1 adalah:

- Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik

(Digital Government Pemerintah Kota Bekasi)

Indikator Sasaran 1 : Indeks Layanan Publik Berbasis IT

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kualitas Pelayanan Diskominfostandi

Indikator Sasaran 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfostandi

Indikator Sasaran 3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi

Target Tujuan dan Sasaran jangka menengah Diskominfostandi tergambar pada tabel 4.1.

**Tabel 4. 2: Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi penyelenggaraan Layanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (Digital Government Pemerintah Kota Bekasi)	Indeks Layanan Publik Berbasis IT	1,59	2,33	3,99	4,35	4,84
			Indeks Layanan Publik Berbasis Digital	1,81	2,70	-	-	-
			Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	2,00	2,30	-	-	-
			Indeks Ketersediaan Data	0,21	1,38	-	-	-
			Indeks Keamanan Informasi	2,35	2,95	-	-	-
			Indeks Layanan Publik Berbasis IT	-	-	3,99	4,35	4,84
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfostandi	-	-	84,80	86,77	88,80
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi	-	-	81,17	82,79	84,44

Adapun formulasi perhitungan Indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 2: Formulasi Perhitungan IKU Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian**

NO.	SASARAN STRATEGIS (KINERJA UTAMA)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (Digital Government Pemerintah Kota Bekasi)</b>	Indeks Layanan Publik Berbasis IT	NILAI	<p>Inpres No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Startegi Nasional Pengembangan E-Government</p> <p>Perpres No.96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita lebar Indonesia</p> <p>Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE</p> <p>UU 14 Tahun 2018 tentang KIP;</p> <p>PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 14 Tahun 2018 tentang KIP;</p> <p>Permenkominfo No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</p> <p>Permenpan RB No 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;</p> <p>Permendagri No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;</p> <p>Permenpan RB No 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>Undang – undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik;</p>	<p>{Nilai Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital + Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik + Nilai Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital + Nilai Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi} : 4</p> <p><b>Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital</b>                      Nilai Rataan{ (Cakupan Unit Kerja Yang Terkoneksi Dengan Jaringan Primer + Cakupan Layanan Informasi Pemerintahan Daerah Kepada Publik + Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Pusat Data)+ Persentase Jumlah platform dengan database yang terintegrasi+Persentase Jumlah Layanan Digital PD)} x 5 ( indeks)</p> <p><b>Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik</b>                      Nilai rataan survey IKM (permenPAN RB) yang dilakukan persemester dalam 1 tahun anggaran x (5 indeks)</p> <p><b>Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital :</b>  <math>\frac{\text{Jumlah Data Sektoral Pada PD Berbasis Digital}}{\text{Jumlah Data Sektoral Pada PD}} \times 5</math> (indeks)</p> <p><b>Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi</b>                      Persentase (Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi + Jumlah indeks kesadaran keamanan informasi aparaturn pemerintah kota Bekasi + Jumlah Audit Reviuw Standarisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi + Jumlah sertifikasi kemanan informasi + Jumlah Infrastruktur Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan fasilitas teknologi keamanan informasi + Jumlah ruangan yang aman dari kebocoran informasi yang berklasifikasi + Jumlah aparaturn yang menerbitkan sertifikasi elektronik + Jumlah aplikasi yang akan menggunakan sertifikasi elektronik(tanda tangan elektronik) ) + Persentase penyelenggaraan jaring komunikasi standi dan pemenuhan alat pendukung dan utama persandian</p>	Kepala Dinas Diskomifostandi	Diskomin fostandi



NO.	SASARAN STRATEGIS (KINERJA UTAMA)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				<p>Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Peraturan Pemerintahan Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik;</p> <p>Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;</p> <p>Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 555.3/Kep.83-DiskominfoStandi/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Kota Bekasi;</p> <p>Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 120/066/Bangda Tanggal 07 Januari 2019 Perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;</p>	<p>Tabel Kategori Indeks SPBE</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 4,2 – 5,0 Memuaskan</li> <li>2. 3,5 – &lt; 4,2 Sangat Baik</li> <li>3. 2,6 – &lt; 3,5 Baik</li> <li>4. 1,8 – &lt; 2,6 Cukup</li> <li>5. &lt; 1,8 Kurang</li> </ol>		

NO.	SASARAN STRATEGIS (KINERJA UTAMA)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfo standi</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfo standi	NILAI	<p>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;</p> <p>Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah</p> <p>Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik</p> <p>Peraturan Walikota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;</p> <p>KEP.Walikota Bekasi No: 555/Kep.150-Diskominfo standi/III/2017 Tentang Tata Kelola Keamanan Informasi di lingkungan pemerintah Kota Bekasi; Kebijakan Dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>	<p><b>Hasil Survey</b> Rumus Perhitungan :</p> <p>- U1 s.d U9 = Unsur Pelayanan</p> <p>- NNR = Nilai Rata-rata</p> <p>- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>-*) = Jumlah NRR IKM Tertimbang</p> <p>-**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25</p> <p>- NRR Per Unsur = <math>\frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{Jumlah kuesioner yang terisi}}</math></p> <p>- NRR = NRR per unsur x 0,011</p> <p>• IKM UNIT PELAYANAN DISKOMINFO STANDI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan Fasilitasi Sertifikat Elektronik</li> <li>2. Layanan Data Statistik Sektoral</li> <li>3. Layanan Penyediaan Wi-fi bekasikotapatriot Gratis di ruang Publik</li> <li>4. Layanan Pengaduan Call Center 1500444/SP4N LAPOR)</li> <li>5. Layanan Publikasi informasi Web/akun medsos</li> <li>6. Layanan Liputan Kegiatan</li> </ol>		

NO.	SASARAN STRATEGIS (KINERJA UTAMA)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;</p>	<p><b>Mutu Pelayanan :</b></p> <p>A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00</p> <p>B (Baik) : 76,61 - 88,30</p> <p>C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60</p> <p>D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99</p>		

NO.	SASARAN STRATEGIS (KINERJA UTAMA)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	NILAI	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi akip untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/Unit kerja. Hasil Evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai dan peringkat.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai bobot dari setiap komponen AKIP.            Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat            AA (&gt;90-100)            A (&gt;80-90)            BB (&gt;70-80)            B (&gt;60-70)            CC (&gt;50-60)            C (&gt;0-30)         </div>		

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi menunjukkan adanya relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

**Tabel 5. 1: Tabel Relevansi dan Konsistensi Terhadap Visi Misi RPJMD**

<b>VISI</b>	<b>: Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan</b>		
<b>MISI</b>	<b>: Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi penyelenggaraan Layanan Publik	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (Digital Government Pemerintah Kota Bekasi)	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah melalui peningkatan tata kelola, Pemanfaatan IT dan Pengembangan SDM	Pengembangan Layanan Publik Berbasis IT (Program 22)
	2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah		Pengembangan Sistem Layanan Cepat Tanggap Terhadap Penanganan Sampah, Limbah, domestic, air minum, jalan saluran, PJU dan Kecamatan berbasis IT (Program 23)

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**Tabel 6. 1: Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Berdasarkan Peraturan Permendagri No 13 Tahun 2016**

Tujuan	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAI AN PADA TAHUN AWAL PEREN CANA AN (2019)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KER JA PEN ANG GUN G JAW AB	LOKASI			
						2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA					
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi penyelenggaraan Layanan Publik	1.1 Meningkatkannya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (Digital Government Pemerintah Kota Bekasi)			IKT 1 :INDEKS LAYANAN PUBLIK BERBASIS IT	-	1,59		2,33								2,33					
				IKS 1.1.1.indeks Layanan Pemerintah/Publik Berbasis Digital	-	1,81		2,70													
				IKS 1.1.2 Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	-	2,000		2,30													
				IKS 1.1.3 Indeks Ketersediaan Data dan Informasi	-	0,21		1,38													
				IKS 1.1.3 Indeks Keamanan Informasi	-	2,35		2,95													
		I	Program pengelolaan E-Government					2.890.000.000		3.930.000.000								6.820.000.000			
						IKP.1 Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Pusat Data	93%	94%	-	94,5%	-							94,5%	-	Bidang TIK	
1	Pengelolaan Data Centre Pemerintah Kota Bekasi			Jumlah Fasilitas Data Center terpelihara	1 data center	1 data center	312.118.000	1 data center	266.406.000							1 data center	578.524.000	Bidang TIK	Kota Bekasi		
				Jumlah Perangkat Monitoring System yang tersedia	-	1 set										1 set					

		Tersedianya Colocation Backup DRC	11 bulan	11 bulan									11 bulan					
		Jumlah Peralatan Penunjang data center	-	1 paket									1 paket					
		IKP.2 Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Layanan Digital Government	0	9		12							21			bidan g egov		
2	Pengembangan Sistem Website OPD dan Pemeliharaan Sim Se-Kota Bekasi	Jumlah Sistem Website OPD yang dikembangkan	103 web	103 website	90.000.000	-	-						103 web	90.000.000		bidan g egov	Kota Bekasi	
		Jumlah SIM perangkat Daerah yang terpelihara	-	10 sim		-							10 sim					
		Belanja Komputer oll in one	-	2 buah		-							2 buah					
3	Implementasi Pengembangan Smart City	Jumlah Perangkat penunjang pengembangan smart city yang tersedia	-	1 unit server	141.800.000	3 unit (server, memory, Hardisk)	318.734.000						4 unit	460.534.000		bidan g egov	Kota Bekasi	
		jumlah layanan digital untuk PD	-	5 Layanan Digital		9 Layanan Digital							14 Layanan Digital					
		Jumlah Dokumen DED Commad Center yang tersedia				1 dokumen							1 dokumen					
		Jumlah aplikasi siencang dengan Sirup, Pengembangan aplikasi dengan SIPATEN, Aplikasi antrian Online dan penambahan fitur CCTV pada website Kota Bekasi yang terintegrasi				4 aplikasi							4 aplikasi					
4	Pengadaan Sarana Video Conference	Jumlah Perangkat Video conference di ruang rapat wali kota, ruang rapat walikota dan ruang rapat nonon sonthanie yang terpasanga	-	-		3 lokasi	1.500.000.000						3 lokasi	1.500.000.000		bidan g egov	Kota Bekasi	
		Jumlah Perangkat Video Conference Mobile yang tersedia	-	-		2 perangkat							2 perangkat					
		Jumlah Interactive Flat Panel 86 inch	-	-		2 unit							2 unit					
		IKP.3 Jumlah Layanan Digital Government yang di Integrasikan	0	9		12							21			bidan g egov		

5	<b>Management Integrasi Data</b>	Jumlah platform Database yang terintegrasi	-	9 Platform	189.000.000	-	-						9 Platform	189.000.000	bidang egov	Kota Bekasi
		IKP. 4 Cakupan Unit Kerja Yang Terkoneksi Dengan Jaringan Primer	9%	9%	-	34%	-						34%	-	Bidang TIK	
6	<b>Penyediaan Jaringan FO (Intranet) Kecamatan Kelurahan, SMPN dan Puskesmas se-Kota Bekasi</b>	Jumlah Jaringan Intranet dan Internet di Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas dan SMP Negeri Se-Kota Bekasi	-	61 titik	353.725.000	-	394.000.000						61titik	747.725.000	Bidang TIK	Kota Bekasi
		Jumlah Jaringan Intranet dan Internet di SMP Negeri Se-Kota Bekasi, kecamatan, dan perangkat daerah	-	-		61 titik										
7	<b>Pengelolaan jaringan TIK Pemkot Bekasi</b>	Jumlah Tower jaringan TIK yang terpelihara	14 tower	2 tower	303.357.000	2 tower	295.860.000						2 tower	599.217.000	Bidang TIK	Kota Bekasi
		Jumlah Perangkat Jaringan TIK yang terpenuhi	-	25 Jenis ( 1 paket)		1 paket (11 jenis)							2 paket			
		Jumlah Infrastruktur Jaringan Fiber Optik (existing) Pemerintah Kota Bekasi jalur ring Jl. Ahmad Yani	-	-		1 Lokasi							1 lokasi			
		Jumlah Infrastruktur Jaringan Fiber Optik (existing) Pemerintah Kota Bekasi jalur ring Jl. Ir. H Juanda	-	-		1 Lokasi							1 lokasi			
		IKP. 5 Cakupan Layanan Informasi Pemerintahan Daerah Kepada Publik	34,5%	34,5%	-	50,8%	-						50,8%	-	Bidang TIK	
8	<b>Penyediaan Free Hotspot</b>	Jumlah Free Wifi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Ruang Publik	257 titik	318 titik	1.500.000.000	244 titik	1.155.000.000						244 titik	2.655.000.000	Bidang TIK	Kota Bekasi
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>				150.000.000		60.000.000							210.000.000		



		iIKP 1Persentase Pengembangan Strategi Komunikasi Publik dalam Rangka Diseminasi Informasi Pemerintah Kota Bekasi	1	17%	-	33%	-						33%	-	bidan g PIP	
		IKP 2Persentase Penyebaran Informasi melalui Media Digital dan Media Luar Ruang	647	91%	-	93%	-						93%	-	bidan g PIP	
9	Pengelolaan Informasi Pemerintah Daerah Kota Bekasi	Jumlah Lomba Logo HUT Kota Bekasi	-	-		1 Lomba Logo HUT Kota Bekasi tematis (kali)	60.000.000						1 Lomba Logo HUT Kota Bekasi tematis (kali)	60.000.000	bidan g PIP	Kota Bekasi
		Jumlah Lomba Fotografi Tematis dalam rangka HUT Kota Bekasi	-	-		1 Lomba Foto HUT Kota Bekasi tematis (kali)							1 Lomba Fotografi Tematis dalam rangka HUT Kota Bekasi (kali)			
		IKP 3 Persentase Laporan Hasil Tindaklanjut Aduan Masyarakat secara Online yang Sudah Ditangani oleh PD terkait	470	83%		85%							85%			
10	Pengelolaan Konten Website Bekasikota.go.id dan akun medsos Pemerintah Kota Bekasi	Jumlah website bekasikota.go.id yang dikelola	1 website	1 website	150.000.000	-	-						1 website	150.000.000	bidan g PIP	Kota Bekasi
III	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK SEKTORAL</b>															
		IKP 1 Persentase Data Sektoral yang Terintegrasi dengan Open Data Kota Bekasi	-	4%	-	28%	-						28%	-	Bid Stand i	
		IKP 2 Persentase Data Sektoral PD yang Harus Dipenuhi	-	4%	-	28%	-						28%	-	Bid Stand i	

IV	PROGRAM PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				250.000.000		250.000.000							500.000.000		
		IKP 1 Persentase Sistem Keamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola	100%	100%	-	100%	-						100%	-	Bidang TIK	
11	Tata Kelola Keamanan Informasi	Jumlah Audit Review Standarisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	1 dok audit	1 dok audit	150.000.000	1 dok audit	150.000.000						2 dok audit	300.000.000	Bidang TIK	Kota Bekasi
		Jumlah sertifikasi kemanan informasi	-			1 sertifikat							1 sertifikat			
		Jumlah Perangkat Keamanan sistem dan Jaringan	1 Unit	1 unit		1 unit							2 unit			
		IKP 2 Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian	3,5%	16,5%	-	42,5%	-						100%	-	Bidang Stand i	
12	Pemenuhan Alat Pendukung Utama dan Wajib Persandian	Jumlah Laptop, scanner, printer, alat jammer yang tersedia	-	3,2,1,1 unit	100.000.000		100.000.000						3,2,1,1 unit	200.000.000	Bidang Stand i	Kota Bekasi
		jumlah link frekuensi yang tersedia				4 titik							4 titik			
I	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				15.000.000		-							15.000.000		
		Persentase Peningkatan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%		100%							100%		Sekre tariat	
13	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Renstra, renja, evaluasi renja, lakip, tapkin, sakip yang tersedia	-	32 dok (Renstra, renja, evaluasi renja, lakip, tapkin, sakip)	15.000.000	-	-						32 dok	15.000.000	Sekre tariat	Kota Bekasi
II	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				20.000.000		-							20.000.000		
		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		100%							100%		Sekre tariat	

14	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan		5 orang	20.000.000	-	-						5 orang	20.000.000	Sekretariat	Kota Bekasi
<b>III</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>6.446.445.000</b>		<b>6.686.025.000</b>							<b>13.132.470.000</b>		
		<b>Presentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>							<b>100%</b>		Sekretariat	
15	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah belanja sewa bandwidth Fiber Optik Internasional Dedicated (utama) jaringan primer	-	12 bulan	3.000.000.000		3.388.775.000						12 bulan	6.388.775.000	Sekretariat	Kota Bekasi
		jumlah Tersedianya biaya radio	-	1 tahun									1 tahun			
		jumlah tersedianya call center 1500444	-	12 bulan									12 bulan			
		jumlah tersedianya TV kabel	-	12 bulan									12 bulan			
		Jumlah tersedianya akses internet di gerai pelayanan publik	-	9 bulan									9 bulan			
		jumlah tersedianya akses lokal loop/FITx	-	11 bulan									11 bulan			
		jumlah tersedianya layanan email pemkot bekasi	-	12 bulan									12 bulan			
		jumlah tersedianya biaya tahunan apji	-	1 tahun									1 tahun			
		jumlah tersedianya bandwidth domestik dan internasional IP	-	12 bulan									12 bulan			
		jumlah tersedianya biaya sewa VPN layanan SIM dan GPP	-	12 bulan									12 bulan			
		Jumlah Rekening	-	-			244 rek/bulan						288 rekening			
16	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer	-	69 jenis barang	130.000.000		120.000.000						106 jenis barang	250.000.000		
17	Penyedia makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai yang disediakan		400 dus	40.000.000		8.650.000						400 dus	48.650.000		
		Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia		81 dus			-						81 dus			

		Jumlah makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu yang disediakan		-		162 pack							162 pack			
18	Penyedia Jasa tenaga administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	-	49 orang	2.650.975.000	47 orang	3.045.000.000						47 orang	5.695.975.000		
19	Penyediaan Jasa Keamanan kantor	piket sandi dan telekomunikasi		10000 oh	132.470.000	-	-						1000 oh	132.470.000		
20	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang-barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		21 jenis barang	104.000.000	16 jennis barang	109.000.000						37 barang	213.000.000		
21	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bcaaan , majalah/buletin yang tersedia		8000 eks, 60 eks	39.000.000	2600 buku/ekse mplar	14.600.000						10600 buku/eks	53.600.000		
22	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan dinas		516 kali	350.000.000	-	-						-	350.000.000		
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>300.000.000</b>		<b>64.675.000</b>							<b>364.675.000</b>		
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		<b>100%</b>		<b>100%</b>							<b>100%</b>		Sekretariat	
23	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang terpelihara	-	9 unit kendaraan roda 4, 7 unit kendaraan roda2	250.000.000	9 unit kendaraan roda 4, 7 unit kendaraan roda2	45.000.000						9 unit kendaraan roda 4,7 unit kendaraan roda2	295.000.000	Sekretariat	Kota Bekasi
24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpelihara	-	125 unit komputer, printer, laptop	50.000.000	49 unit komputer, printer, laptop	19.675.000						49 unit	69.675.000		
					<b>10.071.445.000</b>		<b>10.990.700.000</b>							<b>21.062.145.000</b>		

Tabel 6. 2: Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

Tabel 6. 2: Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019

Tujuan	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2019)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	HASIL KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	LOKASI			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA								
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi pelayanan Publik secara Elektronik (Digital Government Pemerintah Kota Bekasi)	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Informasi secara Elektronik (Digital Government Pemerintah Kota Bekasi)	03	I Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	IKT 1 : INDEKS LAYANAN PUBLIK BERBASIS IT						3,99		4,35		4,84		4,84								
				IKS 1.1 : INDEKS LAYANAN PUBLIK BERBASIS IT					3,99		4,35		4,84		4,84									
				IKS 1.2 : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfostandi							84,8		86,77		88,8		88,8							
				IKS 1.3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi							81,17		82,79		84,44		84,44							
										2.890.000.000		3.930.000.000		11.450.000.000		16.560.000.000		19.230.000.000		54.060.000.000				
				IKP 1 : Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital						3,18		4,08		4,96		4,96		Bid TIK & Egov						

2	1	03	2,	0	1. Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peresentase Pengelolaan Infrastruktur Jaringan TIK, Pusat Data, dan Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital					100%		100%		100%		Bidang Egov & TIK	Persentase Peningkatan Layanan Digital Pemerintah Daerah dan ketersediaan Jaringan Teknologi Komunikasi di Kota Bekasi	Masyarakat & Peringkat Daerah Kota Bekasi		
	1	03	2,	0	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD dengan sistem informasi sesuai standar layanan digital government yang dikelola	-	-	-	12 PD	249.919.000	12 pd	450.000.000	20	500.000.000	44 pd	bidang egov			Kota Bekasi	
						Jumlah Masterplan digital Government Service yang tersedia	-	-	-	1 dok		-		-		1 dok					
						Jumlah perangkat Server penunjang layanan digital government				-		1 unit		-		1 unit					
2	1	03	2,	0	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Fasilitas Data Center terpelihara	1 data center	1 data center	312.118.000	1 data center	266.406.000	-	400.000.000	-	450.000.000	1 data center	Bidang TIK				
						Jumlah Perangkat Monitoring System yang tersedia	-	1 set		-		-		-							
						Tersedianya Colocation Backup DRC	11 bulan	11 bulan		-		-		-							
						Jumlah Peralatan Penunjang data center	-	1 paket		-		-		-							
						Jumlah Pusat Data Pemerintah Kota Bekasi yang dikelola	-	-		1 data center		1 data center		1 data center							
2	1	03	2,	0	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Sistem Website OPD yang dikembangkan	103 web	103 website	90.000.000	-	-	576.661.000	-	300.000.000	350.000.000	103 web	bidang egov				
						Jumlah SIM perangkat Daerah yang terpelihara	-	10 sim		-		-		-		10 sim					
						Belanja Komputer oll in one	-	2 buah		-		-		-		2 buah					
						Jumlah website OPD yang dikelola	-	-		100 web		101 web		101 web		100 web					

							jumlah PC yang tersedia sebagai sarana pendukung	-	-		-		3 unit		3 unit		-		6 unit		
							Jumlah Hardisk sebagai sarana pendukung penyimpanan data						1 buah		-		-		1 buah		
							jumlah Printer sebagai sarana pendukung kegiatan	-	-		-		1 unit		-		-		1 unit		
2	1	03	2,	0	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah platform Database yang terintegrasi	-	2 Platform	189.000.000	5 Platform	-	-	200.000.000	-	250.000.000	-	250.000.000	7 Platform	889.000.000	bidang egov
							Jumlah platform yang terintegrasi	-	-		-		12 Platform		12 Platform		13 Platform		37 platform		
							Jumlah sarana penunjang integrasi data		-		-		1 unit		1 unit		-		2 unit		
2	1	03	2,	0	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Perangkat penunjang pengembangan smart city yang tersedia	-	1 unit server	141.800.000	3 unit (server, memori, Hardisk)	318.734.000	-	3.500.000.000	-	1.500.000.000	-	750.000.000	4 unit	6.210.534.000	bidang egov
							jumlah layanan digital untuk PD	-	2 Layanan Digital		9 Layanan Digital		12 Layanan Digital		11 layanan digital		10 Layanan digital		44 Layanan Digital		
							Jumlah Dokumen DED Commad Center yang tersedia				1 dokumen				-				1 dokumen		
							Jumlah aplikasi siencang dengn sirup, pengembangan aplikasi Sipaten, Aplikasi antrian online dan penambahan Fitur CCTV pada website kota Bekasi yang terintegrasi	-	-		4 aplikasi				-				4 aplikasi		
							Jumlah Paket Jasa Konsultani Pengawas Pembangunan Command Center	-	-		-		1 paket		-				1 paket		
							Jumlah paket Penataan Interior Ruang Command Center	-	-		-		1 paket		-				1 paket		

2	1	03	2	1	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan peningkatan Kompetensi IT	-	-	2.157.082.000	-	1.844.860.000	10 orang	6.273.800.000	10 orang	13.260.000.000	10 orang	16.530.000.000	30 orang	40.065.742.000	bidang egov		
						Jumlah Jaringan Internet di SDN Negeri se-Kota Bekasi	-	-	-	-	-	356 SD Negeri	-	356 SD Negeri	-	356 SD Negeri	-	356 SD Negeri	-	356 SD Negeri	Bidang TIK dan egov	
						Jumlah Jaringan Intranet dan Internet di Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas dan SMP Negeri Se-Kota Bekasi	-	61 titik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168 titik ( 51 SMPN, 44 Puskesmas, 54 Kelurahan, 12 Kecamatan, 4 UPTB BAPENDA, Dinkes, Dishub Puskesmas Karangkrtri	-	-		
						Jumlah Jaringan Intranet dan Internet di SMP Negeri Se-Kota Bekasi, kecamatan, dan perangkat daerah	-	-	61 titik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah Jaringan Intranet dan Internet di Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	1 titik	-	1 titik	-	1 titik	-	1 titik	-	-	-	
						Jumlah Jaringan Intranet dan Internet di Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	1 titik	-	1 titik	-	1 titik	-	1 titik	-	-	-	
						Jumlah Jaringan Intranet dan Internet di Kecamatan se- Kota Bekasi	-	-	-	-	-	12 Kecamatan	-	12 Kecamatan	-	12 Kecamatan	-	12 Kecamatan	-	-	-	
						Jumlah Jaringan Intranet dan Internet di Kelurahan se- Kota Bekasi	-	-	-	-	-	54 Kelurahan	-	54 Kelurahan	-	54 Kelurahan	-	54 Kelurahan	-	-	-	
						Jumlah Jaringan Intranet dan Internet di Puskesmas Karang Triri	-	-	-	-	-	1 titik	-	1 titik	-	1 titik	-	1 titik	-	-	-	
						Jumlah Jaringan Intranet dan Internet di Puskesmas se- Kota Bekasi	-	-	-	-	-	44 Puskesmas	-	44 Puskesmas	-	44 Puskesmas	-	44 Puskesmas	-	-	-	



						Jumlah Jaringan Intranet dan Internet di SMPN se-Kota Bekasi	-	-	-	51 SMPN	51 SMPN	51 SMPN								
						Jumlah Intranet dan Internet di UPTB Bapenda	-	-	-	4 UPTB	4 UPTB	4 UPTB								
						Jumlah Tower jaringan TIK yang terpelihara	14 tower	2 tower	2 tower	-	-	-	2 tower							
						Jumlah Perangkat Jaringan TIK yang terpenuhi	-	25 Jenis (1 paket)	1 paket (11 jenis)	1 paket (11 jenis)	1 paket (11 jenis)	1 paket (11 jenis)	5 paket (36 jenis)							
						Jumlah Infrastruktur Jaringan Fiber Optik (existing) Pemerintah Kota Bekasi jalur ring Jl. Ahmad Yani	-	-	1 Lokasi	-	-	-	3 lokasi							
						Jumlah Infrastruktur Jaringan Fiber Optik (existing) Pemerintah Kota Bekasi jalur ring Jl. Ir. H Juanda	-	-	1 Lokasi	-	-	-								
						Jumlah Fiber Optik Milik Pemerintah Kota Bekasi yang terpelihara	-	-	-	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi								
						Jumlah Free Wifi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Ruang Publik	257 titik	318 titik	244 titik	317 titik	700 titik	1000 titik	1000 titik							
						Jumlah Free WiFi di Kp. Irian RW 4 Kelurahan Teluk Pucung	-	-	-	1 titik	-	-								
2	1	03	2,	1	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah sarana penunjang Digital Government Kota Bekasi	-	-	-	1.500.000.000	-	249.620.000	1 paket	400.000.000	1 paket	400.000.000	2 paket	2.549.620.000	bidang egov	
						Jumlah pembelian pc dan layar interaktif untuk sarana penunjang command center dan workshop	-	-	-	7 unit	7 unit	12 unit	26 unit							
						Jumlah pengadaan Server	-	-	-	1 unit	-	1 unit	2 unit							

							Jumlah Perangkat Video conference di ruang rapat wali kota, ruang rapat walikota dan ruang rapat nonon sonthanie yang terpasanga	-	-		3 lokasi	-	-	-	-	3 lokasi							
							Jumlah Perangkat Video Conference Mobile yang tersedia	-	-		2 perangkat	-	-	-	-	2 perangkat							
							Jumlah Interactive Flat Panel 86 inch	-	-		2 unit	-	-	-	-	2 unit							
		2	16	02			<b>II PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>			150.000.000		60.000.000		380.000.000		2.390.000.000		2.460.000.000		5.440.000.000			
							IKP 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik					4,28		4,33		4,38		4,38		bidang PIP	RPJMD Perubahan Menyesuaikan Permen dagri No.90 Tahun 2019)		
		2	16	02	2,01		<b>1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a</b>					<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		bidang PIP	Persentase Peningkatan kepuasan masyarakat pada pelayanan pengaduan dan informasi publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Bekasi	
		2	16	02	2,01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah liputan yang dilaksanakan	-	-	-	-	48 Kali	250.000.000	48 Kali	200.000.000	48 Kali	200.000.000	144 kali	650.000.000	bidang PIP		Kota Bekasi
								Jumlah video yang dihasilkan	-	-	-	48 dokumen		48 dokumen		48 dokumen		144 dokumen					
								Jumlah kolaborasi dalam implementasi strategi komunikasi publik	-	-	-		4 kolaborasi		4 kolaborasi		8 kolaborasi						
								Jumlah laporan analisis media digital	-	-	-	-	12 laporan		12 laporan		24 laporan						

		2	1	02	2,	0														
		6			01	5														


							Jumlah Penyebarluasan Informasi melalui Airtport TV di bandara dengan format Iklan Layanan Masyarakat	-	-				1 Iklan Layanan Masyarakat melalui TV di lingkungan Bandara Soetta dan Halim (bulan)		2 Iklan Layanan Masyarakat melalui TV di lingkungan Bandara Soetta dan Halim (bulan)		3 Iklan Layanan Masyarakat melalui TV di lingkungan Bandara Soetta dan Halim (bulan)							
							Jumlah Penyebarluasan Informasi melalui Sarana Tranportasi Publik Kereta Jarak Menengah dengan format Cover Sit Penumpang dan KA-TV kereta Jakarta Bandung	-	-				1 kali Iklan Layanan Masyarakat melalui cover sit penumpang & KA-TV Kereta Jakarta-Bandung (Gerbon g)		2 kali Iklan Layanan Masyarakat melalui cover sit penumpang & KA-TV Kereta Jakarta-Bandung (Gerbon g)		3 kali Iklan Layanan Masyarakat melalui cover sit penumpang & KA-TV Kereta Jakarta-Bandung (Gerbon g)							
							Jumlah Penyebarluasan Informasi melalui Sarana Tranportasi Publik Kereta Comuterline dengan format iklan layanan masyarakat di media elektronik	-	-				1 kali Iklan Layanan Masyarakat melalui media elektronik di gerbong comuter line (bulan)		3 kali Iklan Layanan Masyarakat melalui media elektronik di gerbong comuter line (bulan)		4 kali Iklan Layanan Masyarakat melalui media elektronik di gerbong comuter line (bulan)							
							Jumlah Lomba Logo HUT Kota Bekasi	-	-		1 Lomba Logo HUT Kota Bekasi		1 Lomba Logo HUT Kota Bekasi tematis (kali)		1 Lomba Logo HUT Kota Bekasi tematis (kali)		1 Lomba Logo HUT Kota Bekasi tematis (kali)		4 Lomba Logo HUT Kota Bekasi tematis (kali)					



								Jumlah Penyebaran informasi melalui media online swasta (Advetorial)	-	-	-	-	-	65 kali penayangan advertorial pada penyedia media online swasta	65 kali penayangan advertorial pada penyedia media online swasta					
		2	1	02	2,	0	Pelayanan Informasi Publik	(Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan media sosial )	-	-	-	50 orang	10.000.000	-	150.000.000	-	150.000.000	50 orang	310.000.000	bidang PIP
								Jumlah Penyusunan Laporan Pengaduan online mingguan/Bulanan yang tersedia melalui call center dan SP4N LAPOR	-	-	-	-	60 laporan	60 laporan	120 laporan					
								Jumlah FGD Pengelolaan Pengaduan Publik yang terlaksana	-	-	-	-	1 kali	1 kali	2 kali					
		2	1	02	2,	0	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah website bekasikota.go.id yang dikelola	1 website	1 website	150.000.000	-	-	1 website	200.000.000	1 website	200.000.000	1 website	550.000.000	bidang PIP
								Jumlah informasi yang disebarkan luaskan melalui website bekasikota.go.id	-	-	-	-	720 informasi	720 informasi	1440 informasi					
								Jumlah Penyusunan laporan penyebaran informasi					12 laporan	12 laporan	24 laporan					
								Jumlah Tenaga Ahli Jurnalis					2 Tenaga ahli Jurnalis	2 Tenaga ahli Jurnalis	4 Tenaga ahli Jurnalis					
		2	1	02	2,	1	Penguatan Kapasitas Sumber daya Komunikasi Publik	Jumlah Peserta bimtek	-	-	-	-	25 orang	200.000.000	25 orang	250.000.000	50 orang	450.000.000	bidang PIP	

		2	1	02	2,	1	Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung layanan informasi dan komunikasi publik	-	-	-	-	-	-	15 jenis	550.000 .000	10 jenis	350.00 0.000	20 jenis	900.000 .000	bidang PIP				
								Jumlah Perangkat Penunjang Pembuatan Infografis	-	-	-	-	-	-	10 jenis		14 jenis		24 jenis						
								Biaya Pulsa Admin Media Sosial Selama 1 Tahun							36 Paket		36 Paket		72 paket						
		2	2	02			<b>III PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL</b>						360.000 .000		450.000 .000		450.00 0.000		1.260.0 00.000						
								Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital					3,5		4,00		5,00		5,00			Bid Standi			
		2	2	02	2,	0	<b>1. Penyelenggara an Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a</b>	<b>1. PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA SEKTORAL PADA PERANGKAT DAERAH BERBASIS DIGITAL</b>	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%			Bid Standi	Persentase Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral Pemerintah Kota Bekasi	Masyar akat & Perangk at Daerah Kota Bekasi	
		2	2	02	2,	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah koordinasi pengumpulan data prioritas pd yang terlaksana	-	-	-	-	-	60.000. 000	1 kali	150.000 .000	1 kali	150.00 0.000	2 kali	360.000 .000	Bid Standi				Kota Beka si
								Jumlah peserta bimbingan penyusunan data statistik sektoral OPD se Kota Bekasi yang terlaksana	-	-	-	-	110 orang	-	-	-	-	110 orang							
								Jumlah buku profil Kota Bekasi							1 dokume n		1 dokume n		2 dokume n						

		2	2	02	2,	0	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Portal Satu Data Kota Bekasi	-	-	-	-	-	1 Portal Satu Data Kota Bekasi	300.000.000	-	300.000.000	-	300.000.000	1 Portal Satu Data Kota Bekasi	900.000.000	Bid Standi				
								Jumlah PD yang mengupdate data	-	-	-	-	-	-			44 pd		44 pd	44 pd						
								Jumlah Portal Satu Data Kota Bekasi yang terkelola	-	-	-	-	-			Portal Satu Data Kota Bekasi yang terkelola		Portal Satu Data Kota Bekasi yang terkelola		Portal Satu Data Kota Bekasi yang terkelola						
		2	2	02			<b>IV PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>				250.000.000		250.000.000		500.000.000		1.200.000.000		1.010.000.000		3.210.000.000					
								IKP 2. : INDEKS PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI						5,00		5,00		5,00		5,00			Bidang TIK & standi			
		2	2	02	2,		<b>1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a</b>	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PERANGKAT DAERAH						<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>			Bidang TIK & standi	Persentase Peningkatan Keamanan Informasi bagi Pemerintah	Masyarakat & Perangkat Daerah Kota Bekasi	
		2	2	02	2,	0	Penetapan Kebijakan Tata Kelola	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	85.000.000	1 dokumen	85.000.000	2 dokumen	170.000.000	Bidang TIK				Kota Bekasi
							Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi	Indeks Kesadaran Keamanan Informasi (security awerenss indeks)	-	-	-	-	-	-	1 kali bimtek , dokumen		1 kali bimtek , dokumen		2 kali bimtek , dokumen							
							Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Sosialisasi PD yang Peggawainya memiliki tingkat kesadaran infomasi	-	-	-	-	-	-	1 kali sosialisasi		1 kali sosialisasi		2 kali sosialisasi							



		2	2	02	2,	0	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah ruangan yang aman dari kebocoran informasi yang berklasifikasi	-	-	-	-	7 Ruangan	190.000 .000	7 Ruangan	245.000 .000	7 Ruangan	255.00 0.000	21 ruangan	690.000 .000	Bidang Standi	
								Jumlah aparatur yang menerbitkan sertifikasi elektronik	-	-	-	-	60 aparatur		60 aparatur		60 aparatur		180 aparatur		Bidang Standi	
								Jumlah aplikasi yang akan menggunakan sertifikasi elektronik (tanda tangan elektronik)	-	-	-	-	-		1 aplikasi		1 aplikasi		2 aplikasi		Bidang Standi	
								Jumlah sosialisasi Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Milik Pemerintah Daerah	-	-	-	-	1 kali		1 kali		1 kali		3 kali		Bidang Standi	
		2	2	02	2,	0	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Audit Reviu Standarisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	1 dok audit	1 dok audit	150.00 0.000	1 dok audit	150.000 .000	1 dok audit	150.000 .000	-	650.000 .000	-	440.00 0.000	3 dok audit	1.540.0 00.000	Bidang TIK
								Jumlah sertifikasi kemanan informasi	-	-	-	1 sertifikat	-	-	-	-	-	-	1 sertifikasi		Bidang TIK	
								Jumlah Perangkat Keamanan sistem dan Jaringan	1 Unit	1 unit	-	1 unit	-	-	-	-	-	-	2 unit		Bidang TIK	
								Jumlah Audit Reviu Standarisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	-	-	-	-	-	1 dok audit	-	1 dok audit	-	1 dok audit	2 dok audit		Bidang TIK	
								Jumlah sertifikasi kemanan informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	1 sertifikasi	-	1 sertifikasi		Bidang TIK	
								Jumlah Infrastruktur Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan fasilitas teknologi keamanan informasi	-	-	-	-	-	1 lisensi ssl, 1 unit firewall, 1 saertifikat ISO 2000- 1:2018, 1 laptop	-	1 dok audit reviuw sms, 1 lisensi firewall, 1 laptop	-	1 lisensi ssl, 1 unit firewall, 1 saertifikat ISO 2000- 1:2018, 1 dok audit reviuw sms, 2 laptop,		Bidang TIK		

																1 lisensi firewall																					
		2	21	02	2,02		<b>2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>PERSENTASE PENYELENGGARAAN JARING KOMUNIKASI SANDI DAN PEMENUHAN ALAT PENDUKUNG UTAMA DAN WAJIB PERSANDIAN</b>																													
		2	21	02	2,02	01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laptop, scanner, printer, alat jammer yang tersedia	-	3,2,1,1 unit	100.000.000	-	100.000.000	1 Jammer, laptop 2, 1 scanner	160.000.000	1 Jammer, 1 laptop, 1 scanner, 1 printer	220.000.000	1 Jammer, 1 laptop, 1 scanner, 1 printer	230.000.000	1 Jammer, 2 laptop, 1 printer, 1 scanner,	810.000.000	Bidang Standi															Kota Bekasi
								jumlah link frekuensi yang tersedia	-	-		4 titik	-	-	-	-	-	-	-	4 titik																	
								Jumlah pemeliharaan repeater yang tersedia	-	-		-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	3 kali																	
								Jumlah pemeliharaan jammer yang tersedia	-	-		-	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	2 kali																	
								Jumlah operator jaring komunikasi sandi yang terkelola	-	-		-	43 operator	44 operator	44 operator	44 operator	44 operator	44 operator	44 operator	44 operator																	
								Jumlah sarana pendukung utama dan wajibpersandian dan operator jaring komunikasi sandi untuk layanan persandian	-	-		-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																	
		x	x	01			<b>V. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				6.781.445.000		6.750.700.000	20.823.138.000		25.741.588.000		25.941.588.000		86.038.459.000	Sekretariat																

		x	x	01	2.01							100%		100%		100%		100%		Sekretariat					
		x	x	01	2.01	1.						100%		100%		100%		100%		Sekretariat	Meningkatnya Akuntabilitas Aparatur	ASN Diskominfo Standi			
		x	x	01	2.01	01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Renstra, Renja, evluasi	-	-	-	16 dok	25.000.000	16 dok	25.000.000	32 dok	50.000.000	Sekretariat		Kota Bekasi		
		x	x	01	2.01	06	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Renstra, renja, evaluasi renja, lakip, tapkin, saki yang tersedia	-	32 dok (Renstra, renja, evaluasi renja, lakip, tapkin, saki)	15.000.000	-	-	32 dok	25.000.000	-	25.000.000	64 dok	90.000.000					
								Jumlah Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKIP, SAKIP, IKK 2.2 LPPD) Laporan Capaian Kinerja)	Jumlah Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKIP, SAKIP, IKK 2.2 LPPD) Laporan Capaian Kinerja)	-	-	-	-	16 dok	-	16 dok	-	32 dok	-						
		x	x	01	2.08																				
		x	x	01	2.08	2.	02	2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%		100%		100%		100%		Sekretariat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	ASN Diskominfo Standi
		x	x	01	2.08	02	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah belanja sewa bandwidth Fiber Optik Internasional Dedicated (utama) jaringan primer	-	12 bulan	3.000.000.000	-	3.388.775.000	-	4.000.000.000	-	5.050.000.000	12 bulan	20.488.775.000	Sekretariat		Kota Bekasi		
									jumlah tersedianya biaya radio	-	1 tahun	-	-	-	-	-	-	-	1 tahun	-					
									jumlah tersedianya call center 1500444	-	12 bulan	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	-					
									jumlah tersedianya TV kabel	-	12 bulan	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	-					

							Jumlah tersedianya akses internet di gerai pelayanan publik	-	9 bulan		-		-		-		9 bulan		
							jumlah tersedianya akses lokal loop/FITx	-	11 bulan		-		-		-		11 bulan		
							jumlah tersedianya layanan email pemkot bekasi	-	12 bulan		-		-		-		12 bulan		
							jumlah tersedianya viaya tahunan apji	-	1 tahun		-		-		-		1 tahun		
							jumlah tersedianya badwith domestik dan internatinal IP	-	12 bulan		-		-		-		12 bulan		
							jumlah tersedianya biaya sewa VPN layanan SIM dan GPP	-	12 bulan		-		-		-		12 bulan		
							Jumlah Rekening	-	-		288 rek/bulan		-		-		288 rekening		
							Alokasi untuk MPP, GPP, Koramil, Pos Koramil, Polkes Koramil	-	-		-		96 rekening		96 rekening		96 rekening		288 rekening
							Belanja Biaya VPN Layanan SIM, Passport di MPP dan GPP	-	-		-		24 rekening		24 rekening		24 rekening		72 rek
							Belanja Biaya VPN Layanan SIM, Passport di MPP dan GPP (Baru)	-	-		-		22 rekening		22 rekening		22 rekening		66 rek
							Belanja Faksimili	-	-		-		12 rekening		12 rekening		12 rekening		36 rek
							Belanja Sewa VPN Layanan SIM, Passport di MPP dan GPP (Baru)	-	-		-		2 rekening		2 rekening		2 rekening		6 rek
							Belanja Tagihan Air	-	-		-		12 Rekening		12 Rekening		12 Rekening		36 rek
							Belanja Tagihan Listrik	-	-		-		12 Rekening		12 Rekening		12 Rekening		36 rek
							Biaya Call Center 1500444	-	-		-		12 Rekening		12 Rekening		12 Rekening		36 rek

									2 Rekening g		2 Rekening g		2 Rekening g		6 rek		
									12 Rekening g		12 Rekening g		12 Rekening g		36 rek		
									12 Rekening g		12 Rekening g		12 Rekening g		36 rek		
									33 Rekening g		33 Rekening g		33 Rekening g		99 rek		
									24 Rekening g		24 Rekening g		24 Rekening g		72 rek		
									48 Rekening g		48 Rekening g		48 Rekening g		144 rek		
									2 rekening g		2 rekening g		2 rekening g		6 rek		
									12 Rekening g		12 Rekening g		12 Rekening g		36 rek		
									36 Rekening g		36 Rekening g		36 Rekening g		72		
									20 Rekening g		20 Rekening g		20 Rekening g		108 rek		
									1 Rekening g		1 Rekening g		1 Rekening g		3 rek		
									3 Rekening g		3 Rekening g		3 Rekening g		9 rek		
									72 Rekening g		72 Rekening g		72 Rekening g		216 rek		
									1 Rekening g		1 Rekening g		1 Rekening g		3 rek		
									50 Rekening g		50 Rekening g		50 Rekening g		150 rek		
									22 Rekening g		22 Rekening g		22 Rekening g		66 rek		



		x	x	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Olahraga yang tersedia	-	-	-	-	201 stel	68.600.000	201 stel	120.000.000	201 stel	120.000.000	603 stel	308.600.000	Sekretariat			Kota Bekasi
								Jumlah Pakaian Dinas Harian	-	-	-	-			125 stel		125 stel		250 stel					
								Jumlah Sepatu olahraga	-	-	-	-			125 pasang		125 pasang		250 pasang					
		x	x	02	2,05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	-	5 orang	20.000.000	-	8 orang	40.000.000	10 orang	50.000.000	12 orang	60.000.000	35 orang	170.000.000				
								<b>IKP 4. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		Sekretariat			
		x	x	01	2,06		<b>5. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		Sekretariat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	ASN Diskominfo	
		x	x	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	-	-	-	-	16 komponen	25.000.000	20 komponen	35.000.000	25 komponen	40.000.000	900 komponen	100.000.000	Sekretariat			Kota Bekasi
		x	x	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	-	-	-	-	16 unit	150.000.000	18 unit	200.000.000	20 unit	200.000.000	54 unit	550.000.000				
		x	x	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer	-	69 jenis barang	170.000.000	37 jenis barang	128.650.000	207.300.000	-	230.000.000	-	250.000.000	106 jenis barang	985.950.000				
								umlah Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer	-				3702 unit		4000 unit		4000 unit		11702 unit					
								Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai yang disediakan	-	400 dus	-	-	639 pack		700 pack		700 pack		2439 pack					
								Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	-	81 dus	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								Jumlah makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	-	-	-	162 pack												

		x	x	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang-barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	-	21 jenis barang	104.000.000	16 jenis barang	109.000.000	-	125.400.000	-	135.000.000	-	145.000.000	37barang	618.400.000						
								Jumlah Cetak	-	-		-		3771 rim/lembar		3771 rim/lembar		3771 rim/lembar		11313 rim/lembar							
								Jumlah Cetak Spanduk	-	-		-		105m2		105m2		105m2		105 m2							
								Jumlah Penggandaan	-	-		-		60200 lembar		80000 lembar		90000lembar		77200 lembar							
		x	x	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan, majalah/buletin yang tersedia	-	8000 eks, 60 eks	39.000.000	2600 buku/eksemplar	14.600.000	-	47.000.000	-	55.000.000	-	60.000.000	10600 buku/eks	215.600.000						
								Jumlah Bahan Bacaan Koran Yang Tersedia	-	-		-		276 buku/eksemplar		276 buku/eksemplar		276 buku/eksemplar		828 buku/eksemplar							
								Jumlah Bahan Bacaan Majalah Yang Tersedia	-	-		-		112 buku/eksemplar		112 buku/eksemplar		112 buku/eksemplar		336 buku/eksemplar							
		x	x	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas	-	516 kali	350.000.000	-	-	-	301.000.000	-	470.000.000	-	500.000.000	-	1.621.000.000						
								Jumlah Frekuensi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah/Perjalanan Dinas	-	-		-		103 kali		150 kali		150 kali		353 kali							
		x	x	01	2.09		<b>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>			Sekretariat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	ASN Diskominfostandi		
		x	x	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang terpelihara	-	9 unit kendaraan roda 4, 7 unit kendaraan roda2	250.000.000	9 unit kendaraan roda 4, 7 unit kendaraan roda2	45.000.000	-	275.000.000	-	350.000.000	-	400.000.000	9 unit kendaraan roda 4,7 unit kendaraan roda2	1.320.000.000			Sekretariat			Kota Bekasi
								Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas						14 unit		16 unit		18 unit		18 unit							





## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi yang mengacu Pada Tujuan Sasaran Perubahan RPJMD

**Tabel 7. 1: Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	KET
		TAHUN	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	63,49	66,28	70,05	73,25	75,00	77,00	77,00	Perubahan RPJMD
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	78,42	80,98	82,87	84,80	86,77	88,80	88,80	Perubahan RPJMD
3	Indeks penyelenggaraan pengamanan informasi	-	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00	Perubahan RPJMD
4	Indeks Pengelolaan sitem Layanan Publik Berbasis Digital	-	-	-	3,18	4,08	4,96	4,96	Perubahan RPJMD
5	Indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan pengaduan dan informasi publik	-	-	-	4,28	4,33	4,38	4,38	Perubahan RPJMD
6	Indeks ketersediaan data sektoral berbasis digital	-	-	-	3,50	4,00	5,00	5,00	Perubahan RPJMD

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi tahun 2018–2023 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk rentang waktu 5 (lima) tahunan serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Sehubungan dengan implementasi Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi tahun 2018–2023, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :

1. Diskominfostandi berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi;
2. Diskominfostandi berkewajiban menyusun Renja Diskominfostandi Kota Bekasi setiap tahun dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Diskominfostandi dan RKPD Kota Bekasi;
3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra, Diskominfostandi Kota Bekasi berkewajiban melakukan monitoring pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik lima tahunan maupun secara berkala setiap tahunnya.

Adapun Faktor Kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Diskominfostandi Kota Bekasi pada Renstra 2018-2023, antara lain sebagai berikut :

Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya

1. Manusia (SDM) Aparatur Diskominfostandi Kota Bekasi;
2. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;
3. Penyediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dengan sistem dan prosedur yang memadai;
4. Meningkatkan kualitas Perencana dan aparatur lainnya dalam menyusun rencana pembangunan daerah, serta fungsional Diskominfostandi dalam menciptakan inovasi yang berkualitas atau bermanfaat bagi Kota Bekasi;
5. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Diskominfostandi Kota Bekasi.
6. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Diskominfostandi Kota Bekasi secara tanggap, tepat, professional dan bermanfaat.

Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen Renstra Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Diskominfostandi Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun ke depan sehingga dapat mewujudkan visi dan misi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan.

Bekasi, 2 Oktober 2020

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
Statistik Dan Persandian Kota Bekasi,



**Drs. HUDI WIJAYANTO, M. Si**

Nip. 19690121 199007 1 001

